

**STRATEGI PARTAI POLITIK BARU
MENUJU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi pada Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Ummat
Provinsi Lampung)**

(Tesis)

Oleh:

FITRIA BAROKAH



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

STRATEGI PARTAI POLITIK BARU MENUJU PEMILIHAN UMUM 2024

(Studi pada Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Ummat
Provinsi Lampung)

Oleh

FITRIA BAROKAH

Pemilu 2024 semakin dekat menyebabkan bermunculan partai baru yang ikut serta memeriahkan kontestasi tersebut. Partai baru yang muncul pada pemilu 2024 adalah Partai Ummat dan Partai Gelora. Penelitian ini membahas mengenai proses pembentukan partai baru dan strategi partai menuju Pemilu tahun 2024. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pembentukan partai baru dari Demirkol (2014) serta teori strategi bersaing dari Paul Lucardie (2000) meliputi proyek politik, sumber daya partai, dan struktur peluang politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Partai Gelora dan Partai Ummat dibentuk atas dasar perpecahan internal PKS dan PAN. Konflik yang terjadi di PKS, tidak terpenuhi tuntutan Anis Mata melakukan pembaharuan pada PKS sehingga menyebabkan lahirnya GARBI sebagai cikal bakal Partai Gelora. Konflik di PAN sebagai akibat konflik individu Amien Rais dengan Zulkifli Hasan pada Kongres V PAN serta perbedaan tujuan elit PAN terhadap pola koordinasi dan kepemimpinan partai, konflik individu tersebut menyebabkan lahirnya Partai Ummat. Strategi Partai Gelora dan Partai Ummat menuju Pemilu 2024 dengan melakukan promosi identitas partai, mempertahankan basis pemilih, lolos ambang batas parlemen 4%, memanfaatkan sumber daya partai dan peluang politik dengan caranya masing-masing. Partai Gelora memanfaatkan jaringan berasal dari pelaku pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta komunitas. Sedangkan Partai Ummat memanfaatkan sayap partainya untuk memperluas basis pemilihnya. Kedua partai memiliki pemimpin yang sudah memiliki pengaruh di masyarakat dan berpengalaman di dunia politik, Partai Gelora memiliki Anis Matta dan Fahri Hamzah. Sedangkan Partai Ummat memiliki Amien Rais sebagai *figure* yang masih memiliki basis pemilih Muhammadiyah.

Kata Kunci: Konflik Internal Partai; Partai Politik Baru; Strategi Partai; Pemilihan Umum 2024

ABSTRACT

NEW POLITICAL PARTY STRATEGIES TOWARDS 2024 GENERAL ELECTIONS (Studies on the Gelombang Rakyat Indonesia Party and the Ummat Party in Lampung Province)

By

FITRIA BAROKAH

The 2024 election is getting closer, causing the emergence of new parties that will take part in enlivening the contest. The new parties that will emerge in the 2024 elections are the Ummat Party and Gelora Party. This study discusses the process of forming new parties and party strategy toward the 2024 elections. The theory used in this study is the approach to forming new parties from Demirkol (2014) and the theory of competitive strategy from Paul Lucardie (2000) covering political projects, party resources, and the structure of political opportunities. This research uses a descriptive qualitative method. The results of this study explain that the Gelora Party and the Ummat Party were formed on the basis of the internal divisions of PKS and PAN. In the conflict that occurred at PKS, Anis Mata's demand for renewal at PKS was not met, which led to the birth of GARBI as the forerunner of the Gelora Party. The conflict in PAN as a result of Amien Rais' individual conflict with Zulkifli Hasan at the V PAN Congress and the differences in the goals of the PAN elite towards the pattern of party coordination and leadership, this individual conflict led to the birth of the Ummat Party. The strategies for the Gelora Party and the Ummat Party towards the 2024 Election are by promoting party identity, maintaining the voter base, passing the 4% parliamentary threshold, and utilizing party resources and political opportunities in their own way. The Gelora Party utilizes networks from business actors, community leaders, religious leaders, youth, and the community. Meanwhile, the Ummat Party uses its party wing to expand its voter base. Both parties have leaders who already have influence in society and are experienced in the world of politics, the Gelora Party has Anis Matta and Fahri Hamzah. Meanwhile, the Ummat Party has Amien Rais as a figure who still has a Muhammadiyah voter base.

Keywords: Internal Party Conflict; New Political Party; Party Strategy; General Election 2024

**STRATEGI PARTAI POLITIK BARU
MENUJU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi pada Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Ummat
Provinsi Lampung)**

**Oleh:
FITRIA BAROKAH**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **STRATEGI PARTAI POLITIK BARU
MENUJU PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 (Studi pada Partai Politik Gelombang
Rakyat Indonesia dan Partai Ummat
Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Fitria Barokah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2126021017**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006



Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A.
NIP. 19780430 200501 1 002

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006

MENGENGSAHKAN

1. Tim Penguji

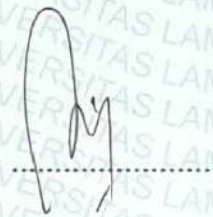
Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



Sekretaris : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A.**



Anggota : **Arizka Warganegara, Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M. Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005



Tanggal Lulus Ujian Tesis : **20 Maret 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul: STRATEGI PARTAI POLITIK BARU MENUJU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi pada Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Ummat Provinsi Lampung) adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Januari 2023



Fitria Barokah
NPM. 2126021017

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fitria Barokah, anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 5 Januari 2000 dari pasangan Bapak Abil Wafa dengan Ibu Kartini. Jenjang pendidikan peneliti dimulai dari tingkat sekolah dasar yaitu SD Negeri Daon 2 Rajeg, Kabupaten Tangerang pada tahun 2005 dan lulus di tahun 2011. Pendidikan tingkat menengah pertama, peneliti selesaikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Rajeg, Kabupaten Tangerang pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014.

Tahun 2017 peneliti dinyatakan lulus pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Semasa kuliah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA. Peneliti melanjutkan jenjang pendidikan pada tahun 2021 dengan tercatat sebagai mahasiswi di Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung melalui program beasiswa lokal Universitas Lampung bebas biaya SPP/UKT.

MOTTO

Orang yang berilmu tidak akan merasa asing di manapun ia berada, sedangkan orang yang tidak berilmu akan merasa asing dimanapun ia berada.

(Syekh Nawawi Al-Bantani)

Kebodohan itu merusak, tapi merasa dirinya paling benar itu lebih merusak

(Gus Baha)

Waktu akan selalu bermanfaat bagi mereka yang memiliki impian besar

(Fitria Barokah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Tesis ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak
Tesis ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat
dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

serta adik-adikku yang ku sayangi sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.

Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Program Pascasarjana
Magister Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan
mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang peneliti cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabiallah Muhammad Rasulullah SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Tesis yang berjudul “Strategi Partai Politik Baru Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024: Studi pada Partai Gelora dan Partai Ummat Provinsi Lampung” sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Bapak Abil Wafa, Ibu Kartini atas segala doa yang tercurahkan, dukungan, kasih sayang dan perhatian yang tidak akan mampu peneliti balas atas banyaknya kebaikan yang diberikan kepada peneliti. Semoga Allah SWT memberikan Bapak dan Ibu perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas kebaikan yang diberikan kepada peneliti. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Adik-Adik peneliti yaitu M. Akbar Fauzi dan Aida Ramadhani atas dukungan dan kasih sayang selama ini, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kemudahan dalam kalian mencapai cita-cita untuk membahagiakan Orang Tua.

Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini antara lain, yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan sebagai Pembimbing Utama Tesis, terimakasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis. Semoga atas segala yang bapak berikan menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A., selaku Pembimbing kedua. Terimakasih atas bimbingan, masukan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis. Semoga budi baik bapak menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.
6. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., selaku Dosen Pembahas. Terimakasih atas kritik, saran, motivasi dan bimbingan sehingga tesis ini memiliki kemajuan yang signifikan pada setiap perbaikan. Semoga budi baik bapak menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.
7. Seluruh Dosen di Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, memberikan ilmu, pengalaman, pembelajaran hidup serta pengetahuan yang diberikan semasa perkuliahan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dalam memberikan perkuliahan di Magister Ilmu Pemerintahan.
8. Semua teman-teman seperjuangan di pascasarjana Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 baik dari konsentrasi Polotda, MP dan TKP terimakasih atas kebersamaannya, suatu kebahagiaan bisa bertemu kalian semua.
9. Keluarga besar Emak Rohati, Abah Saheli, bibi, paman, sepupu, dan ponakan di Tangerang. Terimakasih sudah memberikan do'a, motivasi, dan nasihat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Sahabat saya Ayu Karina, Sri Dewi, Idhar Fisabilhaq terimakasih telah menjadi tempat terbaik dalam keadaan susah ataupun senang. Semoga urusannya selalu dipermudah dan silaturahmi tetap terjaga.
11. Narasumber penelitian, terimakasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada peneliti sehingga tesis ini bisa

diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada peneliti.

Bandar Lampung, 20 Maret 2023

Fitria Barokah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Partai Politik	13
2.1.1 Pengertian Partai Politik	13
2.1.2 Pendekatan Pembentukan Partai Politik	15
2.1.3 Klasifikasi Sistem Kepartaian dan Tipe Partai Politik.....	21
2.2. Konflik Internal Partai Politik.....	25
2.2.1. Konflik Internal Partai	25
2.2.2. Pemetaan dan Manajemen Konflik Internal Partai	28
2.3. Strategi Partai Politik Baru	32
2.3.1. Pengertian Strategi.....	32
2.3.2. Model-Model Strategi.....	33
2.3.3. Strategi Kebaruan Politik Baru.....	35
2.3.4. Strategi Bersaing Partai Politik Baru	36
2.4. Kerangka Pikir	38
III. METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Tipe Penelitian	40
3.2. Fokus Penelitian.....	41
3.3. Informan Penelitian.....	42
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	44
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6. Teknik Pengolahan Data	48
3.7. Teknik Analisis Data.....	50
3.8. Teknik Keabsahan Data	52
IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN	54
4.1. Pemilihan Umum di Indonesia	54

4.1.1.	Pemilihan Umum Tahun 1955.....	54
4.1.2.	Pemilihan Umum Tahun 1971.....	56
4.1.3.	Pemilihan Umum Tahun 1977.....	58
4.1.4.	Pemilihan Umum Tahun 1982.....	59
4.1.5.	Pemilihan Umum Tahun 1987.....	60
4.1.6.	Pemilihan Umum Tahun 1992.....	62
4.1.7.	Pemilihan Umum Tahun 1997.....	62
4.1.8.	Pemilihan Umum Tahun 1999.....	63
4.1.9.	Pemilihan Umum Tahun 2004.....	64
4.1.10.	Pemilihan Umum Tahun 2009.....	65
4.1.11.	Pemilihan Umum Tahun 2014.....	67
4.1.12.	Pemilihan Umum Tahun 2019.....	69
4.1.13.	Pemilihan Umum Tahun 2024.....	71
4.2.	Gambaran Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).....	76
4.2.1.	Sejarah Partai Gelora.....	76
4.2.2.	Lambang dan Makna Partai.....	77
4.2.3.	Asas dan Jati diri Partai Gelora.....	78
4.2.4.	Visi dan Misi Partai Gelora.....	80
4.2.5.	Tujuan dan Fungsi Partai Gelora.....	80
4.2.6.	Kepengurusan Partai Gelora.....	81
4.3.	Gambaran Umum Partai Ummat.....	84
4.3.1.	Lambang dan Makna Partai Ummat.....	85
4.3.2.	Visi dan Misi Partai Ummat.....	86
4.3.3.	Tujuan dan Fungsi Partai Ummat.....	88
4.3.4.	Susunan Organisasi Partai Ummat.....	89
4.4.	Fusi, Konflik dan Perpecahan Partai Politik Di Indonesia.....	91
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	101
5.1.	Perpecahan dan Konflik Partai Politik: Pembentukan Partai Gelora dan Partai Ummat Sebagai Partai Baru Pecahan dari Partai Induk.....	102
5.1.1.	Tahap Perpecahan Partai Politik.....	102
5.1.2.	Pendekatan Pembentukan Partai Politik Baru.....	109
5.1.3.	Konflik Internal Partai Politik: PKS Vs Pembangkang (Partai Gelora) 117	
5.1.4.	Konflik Internal Partai: PAN Vs Pembangkang (Partai Ummat).....	133
5.1.4.1.	Perolehan Suara pada Kongres V Partai Amanat Nasional ...	133
5.1.4.2.	Petahana Versus Restu Amien Rais.....	136
5.1.4.3.	Personafikasi Amien Rais.....	139
5.1.4.4.	Perbedaan Tujuan Tokoh Internal PAN.....	141
5.1.4.5.	Peta Konflik Internal Partai Amanat Nasional.....	146
5.2.	Strategi Partai Ummat dan Partai Gelora Menuju Pemilihan Umum Tahun	

2024	150
5.2.1. Strategi Partai Ummat Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024.....	151
5.2.1.1. Menilik Kebaruan Partai Ummat Sebagai Partai Baru	151
5.2.1.2. Mempertahankan Dominasi Pemilih.....	155
5.2.1.3. Promosi Partai untuk Lolos Ambang Batas Parlemen 4%	162
5.2.1.4. Memanfaatkan Sumber Daya Partai Ummat	171
5.2.1.5. Memanfaatkan Peluang Politik	179
5.2.2. Strategi Partai Gelombang Rakyat Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024	184
5.2.2.1. Menilik Kebaruan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.....	184
5.2.2.2. Mempersiapkan Fitur Kepemimpinan Partai	190
5.2.2.3. Promosi Partai untuk Lolos Ambang Batas Parlemen 4%	197
5.2.2.4. Memanfaatkan Sumber Daya Partai Gelora	205
5.2.2.5. Memanfaatkan Peluang Politik	213
5.3. Konflik, Perpecahan dan Strategi Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Ummat: Menilik Peluang Politik Partai Baru Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024	216
5.3.1. Optimalisasi Media Sosial	222
5.3.2. Optimalisasi Peluang Dukungan Suara.....	225
VI. PENUTUP	232
6.1. Simpulan	232
6.2. Saran	232
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Popularitas Partai Politik Baru Menyongsong Pemilu 2024	4
Tabel 1.2 Keanggotaan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.....	9
Tabel 1.3 Keanggotaan Partai Ummat	9
Tabel 2.4. Klasifikasi Sistem Kepartaian	22
Tabel 3.5. Informan Penelitian.....	43
Tabel 4.6. Nomor Urut Partai Politik pada Pemilu tahun 2024	75
Tabel 4.7. Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora periode 2019-2024	81
Tabel 4.8. Struktur Pengurus DPW Partai Gelora Lampung periode 2019-2024 ..	83
Tabel 4.9. Struktur Pengurus DPW Partai Ummat Lampung periode 2019-2024.	90
Tabel 5.10. Catatan Kasus Faksionalisasi dan Konflik Internal PKS di era Reformasi	119
Tabel 5.11. Rekapitulasi Perolehan suara pada Kongres V PAN	135
Tabel 5.12 Kebaruan Partai Ummat	151
Tabel 5.13. Karya Ilmiah dan Capaian Amien Rais	177
Tabel 5.14. Kebaruan Partai Gelora dari PKS	184
Tabel 5.15. Simpulan Hasil Penelitian	216
Tabel 5.16. Loyalitas Pemilih Partai Politik	226
Tabel 5.17. Elektabilitas dan Volatilitas PAN Merosot Tahun 2022.....	228

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Popularitas Partai Politik Baru di Masyarakat	3
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	39
Gambar 4.3. Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019.....	70
Gambar 4.4. Partai Politik Pada Pemilu 2019	71
Gambar 4.5. Logo Partai Gelora	78
Gambar 4.6. Logo Partai Ummat	86
Gambar 5.7. Tahapan Pembentukan Partai Pecahan.....	103
Gambar 5.8 Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu 1999-2019	119
Gambar 5.9 Alasan Kelahiran Garbi.....	126
Gambar 5.10. Proses Munculnya Partai Gelora	132
Gambar 5.11. Pola Koordinasi Partai Politik PAN	144
Gambar 5.12. Pemetaan Konflik Internal Partai PAN	148
Gambar 5.13. Skema Metode Gerilya Partai Ummat	158
Gambar 5.14. Partai Politik yang Lolos Parlemen Sejak Reformasi	169
Gambar 5.15. Sayap Partai Ummat (Permata Ummat)	174
Gambar 5.16. Sayap Partai Ummat (GARDA Ummat).....	174
Gambar 5.17. Daftar Partai Politik yang Mendapat Kursi Parlemen dari 2004-2019	201
Gambar 5.18. Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia (2015-2022)	225
Gambar 5.19. Loyalitas PKS Menurun	227
Gambar 5.20. Grafik Hasil Survey Elektabilitas PKS dan PAN Merosot	229

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Aturan Dasar
AM	: Anis Matta
ART	: Aturan Rumah Tangga
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
CS	: Cum Suis/ Teman-Teman
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FISIP	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
GARBI	: Gerakan Arah Baru Indonesia
Garuda	: Partai Gerakan Perubahan Indonesia
GARDA	: Generasi Muda Ummat
Gelora	: Gelombang Rakyat Indonesia
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Golongan Karya
GK	: Garga Keadilan
Hanura	: Partai Hati Nurani Rakyat
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KAPMI	: Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
LDK	: Latihan Dasar Kepemimpinan
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPPW	: Majelis Pengawas Partai Wilayah
MPPD	: Majelis Pengawas Partai
MPPC	: Majelis Pengawas Partai Cabang
Mukernas	: Musyawarah Kerja Nasional
NasDem	: Nasional Demokrat
NasDem	: Nasional Demokrat

NU	: Nahdlatul Ulama
PAN	: Partai Amanat Nasional
PAN	: Partai Amanat Nasional
Parpol	: Partai politik
Pemilu	: Pemilihan Umum
Permata	: Perempuan Utama Ummat
Perindo	: Partai Persatuan Indonesia
Pileg	: Pemilihan Legislatif
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PSI	: Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
PPNSI	: Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia
SK	: Surat Keputusan
SPK	: Salimah Serikat Pekerja Keadilan
UNILA	: Universitas Lampung
UU	: Undang-Undang
VS	: Versus

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi menuntut adanya partai politik. Demokrasi modern tidak akan lepas dari bayangan partai politik, karena dalam sistem pemerintahan yang demokratis partai politik berperan vital untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif warga negara pada ranah politik dan pemilihan untuk jabatan publik (White, 2006 dalam Hanafi, 2018). Setelah keruntuhan rezim otoriter pada 1998 salah satu upaya menyambut perubahan rezim ke arah demokratis adalah dengan pendirian partai politik. Sejak itu sejumlah partai dibentuk dan bersaing memperebutkan suara di pemilu. Pendirian partai-partai di awal reformasi karena *political euphoria*, lebih sebagai sebuah luapan emosi politik yang tersumbat selama rezim Orde Baru berkuasa.

Pemilu ditandai dengan keikutsertaan partai politik sebagai peserta Pemilu. Partai politik adalah satu satunya lembaga atau kelompok yang diberikan ruang kepesertaan untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum politik (Zaman, 2017). Olehnya itu partai politik harusnya dikontrol oleh negara. Sebab, dengan adanya partai politik maka negara akan mendapatkan warganegara yang dapat mengemban amanah kenegaraan oleh karena adanya proses perkaderan yang dilakukan oleh partai.

Semakin dekat menuju Pemilu 2024, fenomena kemunculan partai politik baru juga marak terjadi. Jika menilik ke belakang, pada Pemilu 2019 tercatat empat wajah pendatang baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Akan tetapi, hasil suara keempat parpol ini sangat rendah, dan semua partai baru yang mengikuti pemilu legislatif tidak satupun yang lolos ambang batas parlemen. Fenomena partai baru pada setiap penyelenggaraan pemilu tidak ada hentinya. Namun biasanya pasang surut,

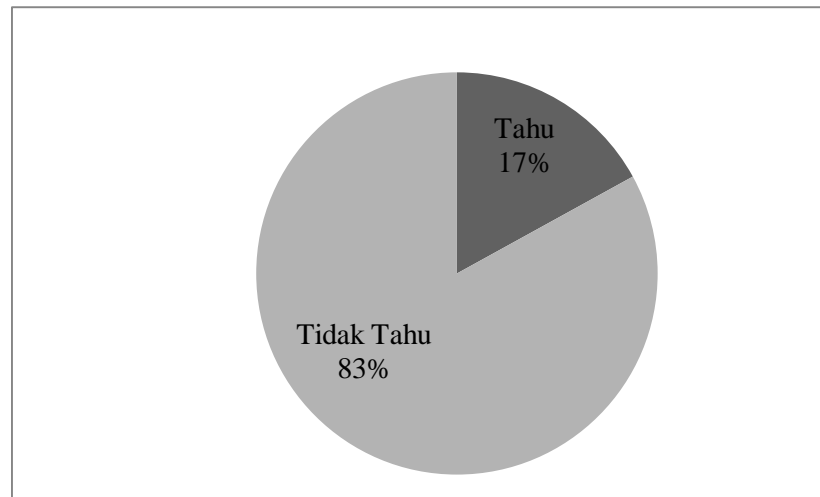
usai pemilu berakhir tidak banyak partai yang mampu bertahan lama. Satu per satu mereka tumbang.

Tumbuhnya partai politik tidak terlepas dari akar sosial dan politik masyarakat (Siavelis, 2006). Penelitian Marijan (2010) menjelaskan kemunculan partai-partai politik baru di Indonesia selain didasarkan pada masyarakat yang pluralistik, yang terutama ditopang oleh demokrasi. Mengenai masuknya parpol baru dalam pemilu, misalnya parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen kemudian berubah haluan menjadi parpol baru agar dapat mengikuti pemilu. Sebab lain ialah surat suara pemilih tidak terikat erat dengan partai politik yang ada, sehingga pemilih tetap bisa bergerak dan mencari partai yang dipandang mewakili kepentingan pemilih (Hanafi, 2018).

Keikutsertaan partai pendatang baru dalam kontestasi elektoral 2024 membuat ruang persaingan semakin ketat karena masing-masing partai akan saling bersaing memperebutkan pasar pemilih untuk mendapatkan kursi parlemen. Tantangan besar partai-partai baru dalam pemilu ialah mereka akan berhadapan dengan partai-partai lama yang sering bertahan dalam pemilu, terbukti dengan keberhasilannya meraih kursi parlemen. Masuknya partai baru dalam kompetisi pemilu membuat ruang persaingan menjadi ketat karena mereka akan saling berebut pasar pemilih. Partai baru pada pemilu akan berhadapan dengan partai lama yang cenderung sudah bisa mempertahankan eksistensinya di pemilu dengan dibuktikan melalui keberhasilan mereka meraih kursi di parlemen.

Menurut survei Politika Research & Consulting (PRC) pada Juni 2022 terkait elektabilitas partai politik. Tidak banyak terjadi perubahan elektabilitas partai-partai, PDI Perjuangan masih menjadi pemuncak sementara elektabilitas partai politik. Dengan besaran elektabilitas mencapai 18,2 persen. Partai Gerindra dengan elektabilitas sebesar 12,7 persen. Kemudian partai Golkar 12 persen. Partai Demokrat dengan elektabilitas 9,7 persen. Selanjutnya PKB 8 persen, PKS 7,8 persen, hingga NasDem 5,5 persen (Bayhaqi, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan publik tetap

pada partai lawas, hal ini akan menjadi musibah sekaligus tantangan partai baru memaksimalkan popularitas dan elektabilitasnya di mata publik untuk memperoleh dukungan. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa berdasarkan survey Litbang Kompas tahun 2021 popularitas nama partai politik baru sangat rendah.



Gambar 1.1 Popularitas Partai Politik Baru di masyarakat

Sumber: Detikcom (2021)

Berdasarkan gambar di atas, Gambar 1.1 menjelaskan dari 34 provinsi menunjukkan partai pendatang baru hanya memiliki angka popularitas 17 persen. Angka masyarakat yang tidak tahu mencapai 83 persen. Gambar 1.1 memperlihatkan minimnya pengetahuan publik akan keberadaan partai baru, hal tersebut harus menjadi agenda utama partai-partai baru terutama untuk mendongkrak popularitasnya. Sebab, memori pilihan publik terhadap partai masih didominasi oleh partai-partai politik lama. Hal itu menjadi tantangan yang tidak mudah bagi partai politik baru. Sebab, rendahnya popularitas nantinya akan berdampak pada tingkat keterpilihan partai.

Tabel 1.1. Popularitas Partai Politik Baru Menyongsong Pemilu 2024

Nama Partai Baru	KOLOM A		KOLOM B	
	Pernah dengar/tahu	Tidak Pernah dengar/Tidak tahu	Suka	Tidak Suka
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	14,31%	85,69%	60,23%	25,57%
Partai Ummat	13,33%	86,67%	53,66%	25,61%
Partai Buruh	12,60%	87,40%	70,32%	17,42%
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	9,43%	90,57%	75,00%	15,52%
Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi Rebon)	8,78%	91,22%	62,04%	20,37%
Partai Prima	6,42%	93,22%	69,62%	16,46%
Partai Pelita	5,37%	93,58%	77,27%	9,09%
Partai Nusantara	5,20%	94,63%	73,44%	14,06%
Partai Usaha Kecil Menengah	5,04%	94,80%	75,81%	16,13%
Partai Rakyat	5,04%	94,96%	80,62%	9,68%
Partai Indonesia Damai	4,39%	95,61%	72,22%	16,67%
Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas)	4,23%	95,77%	76,92%	11,54%
Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai)	3,50%	96,50%	88,37%	2,33%
Partai Indonesia Terang (Pinter)	3,41%	96,59%	80,95%	9,57%

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023) dari politik rmol.id (2022)

Tabel 1.1 memaparkan terdapat lima partai politik baru yang memiliki popularitas cukup tinggi di mata publik sebagaimana hasil survei Indopol. *Pertama*, Partai Gelora dengan popularitas 14,31 persen, disukai 60,23 persen, dan potensi dipilih sebesar 1,7 persen. *Kedua*, Partai Ummat dengan popularitas 13,33 persen, disukai 12,60 persen, dan kecil untuk dipilih. Sebagai partai politik baru yang paling populer, tentunya akan menjadi peluang bagi kedua partai ini. Oleh karena itu, sebagai pendaatang baru, partai baru perlu memiliki strategi maupun pendekatan tersendiri agar dapat memikat simpati masyarakat sekaligus menggagas perubahan dengan tujuan menghancurkan kekecewaan dan kebosanan publik. Jika hal tersebut bisa dilakukan, partai baru memiliki peluang lebih besar untuk mengumpulkan

suara dan memenangkan kepercayaan publik. Sebaliknya, jika mereka tidak memiliki strategi yang cukup mumpuni, partai hanya akan menjadi *staging point* dalam pemilu.

Kemunculan partai baru dalam pandangan Harmel & Robertson (1985) bahwa di antaranya dibentuk untuk menjawab tantangan isu-isu baru. Partai baru ini terkait dengan pembelahan dalam sistem kepartaian. Kemunculan partai baru bagi Harmel juga terkait dengan peristiwa sejarah tertentu di masyarakat. Mair dan Erlingsson dalam Bolin (2007) melihat interpretasi yang serupa bahwa partai baru merupakan partai yang awalnya bukan sebagai anggota sistem partai yang pernah terkonsolidasi. Secara umum partai-partai baru ini muncul dalam tiga cara yang berbeda. *Pertama*, partai baru muncul sebagai konsekuensi penggabungan dua atau lebih partai yang didirikan. *Kedua*, partai-partai baru terbentuk sebagai akibat dari perpecahan internal. *Ketiga*, partai baru muncul sebagai partai yang benar-benar baru, tidak terkait dengan partai lain.

Pertarungan Pemilu 2024 akan semakin semarak, dengan hadirnya beberapa partai baru yang terbentuk akibat perpecahan internal, diantaranya Partai Gelora Indonesia, Partai Ummat. Kedua partai baru ini ternyata memiliki satu aspek kesamaan, mereka berasal dari komunitas Islam politik. Partai Gelora meskipun mendeklarasikan diri sebagai partai nasionalis atau partai tengah, kelahirannya tidak bisa lepas dari faksionalisasi di salah satu partai Islam, sedangkan Partai Ummat dari awal telah mengidentifikasi sebagai partai Islam, kehadiran sosok Amien Rais, semakin menempatkan partai ini berada di spektrum kanan (Argenti, 2021).

Bersamaan dengan semakin berperannya parpol dalam kehidupan negara yang demokratis, timbul konflik-konflik di dalam tubuh parpol. Pelembagaan partai politik juga mengatur tentang bagaimana partai tersebut menjalankan peran dan fungsinya sekaligus dalam menyelesaikan konflik baik eksternal maupun internal (Mardaya dkk, 2019). Oleh karena itu, jika pelembagaan partai politik masih rendah, konflik internal partai tidak terselesaikan, bahkan

berujung perselisihan internal parpol hingga mengakibatkan parpol bersangkutan pecah.

Penelitian dari Nurhasim (2013) menggambarkan adanya perbedaan dan konflik internal pada tubuh partai politik memancing anggota untuk meninggalkan dan memilih keluar kemudian membuat partai baru. Konflik internal parpol disertakan dengan faktor yang dipengaruhi oleh kuatnya tokoh yang mengambil peran penting sebagai penggerak parpol, sehingga perselisihan internal parpol akan menyebabkan tokoh-tokoh pendiri partai meninggalkan parpol yang dibentuknya semula (Barokah dkk, 2022).

Kehadiran Partai Gelora dan Partai Ummat dalam kancah perpolitikan Indonesia terbilang sangat muda, namun perlu diperhitungkan, karena para pendiri partai merupakan mantan politikus berpengalaman (Widyana, 2022). Partai Gelora didirikan 28 Oktober 2019 dan dideklarasikan pada 10 November 2019 oleh mantan tokoh muda berpengaruh PKS. Di ketuai oleh Anis Matta. Partai Gelora Indonesia terbentuk karena beberapa kadernya terlibat dalam pusaran konflik di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui, banyak petinggi Partai Gelora merupakan bekas kader yang sudah keluar dari PKS (CNN Indonesia, 2019). Hadirnya Partai Gelora tentu mengejutkan banyak pihak, terlebih budaya organisasi di rumah sebelumnya terbilang sangat rapih dalam mengelola konflik politik di internal partai (Argenti, 2021).

Partai Gelora memilih jalannya sendiri, memilih ideologi berbeda dengan partai induk, yakni nasionalis sebagai pijakan berpolitik. Pilihan mendirikan partai nasionalis berasas pancasila. Dengan mengusung ideologi yang berbeda, partai ingin memperluas ceruk pemilih, tidak dari satu segmentasi pemilih tertentu, tapi merangkul semua entitas politik di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan, meski mendeklarasikan sebagai partai nasionalis, sepertinya stigma sebagai kelompok Islamis tetap ada, terlebih di media Anis Matta menjelaskan partainya nasionalis jati dirinya

Islam, sebuah diksi baru dalam panggung politik nasional, biasanya diksinya partai nasionalis religius (Argenti, 2021).

Kehadiran partai baru lainnya yaitu Partai Ummat, didirikan 29 April 2021 oleh Amien Rais, mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan mantan ketua MPR. Asal muasal dibentuknya partai ini disebabkan ketidakharmonisan Amien Rais dengan beberapa politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan dilatarbelakangi hasil Kongres V PAN yang digelar di Kota Kendari pada bulan Februari 2020. Kehadiran Partai Ummat sedikit berbeda dengan Partai Gelora Indonesia yang lahir dari perbedaan bersifat ideologis mengenai keterbukaan.

Meskipun secara ideologi politik, PAN dan Partai Ummat berbeda. PAN berideologi nasionalis-religius, Partai Ummat itu partai Islam. Perbedaan ideologi politik tentu akan membawa konsekuensi berbeda dalam basis sosial di masyarakat (Detiknews, 2020). Meskipun kemudian Partai Ummat memilih ideologi berbeda dengan partai induk, tetapi pilihan berbeda ideologi bukan isu utama dari akar faksionalisasi, karena wacana bersifat ideologis dari awal tidak begitu nampak mewarnai dinamika faksi-faksi di internal partai (Argenti, 2021).

Pemimpin partai baru, yaitu Amien Rais dan Anis Matta sama-sama keluar dari partai politik yang didirikannya. Amien keluar dari PAN, dan Anis keluar dari PKS yang ikut didirikannya. Amien dan Anis kemudian mendirikan partai politik baru yang telah lolos dan dinyatakan sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Perbedaan antara Amien Rais dan Anis Matta saat ini adalah, Amien yang dulunya menjadi pendiri dan bergabung di partai nasionalis, kemudian mendirikan partai Islam, yaitu Partai Ummat. Sedangkan Anis dulunya adalah pendiri dan bergabung di partai Islam sekarang mendirikan partai nasionalis, yaitu Partai Gelora.

Pemilu 2024 akan mengikutsertakan 18 partai politik pasca Partai Ummat dinyatakan lolos setelah melengkapi persyaratan administrasi di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Partai Ummat dinyatakan memenuhi

ketentuan Pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana partai politik peserta pemilu harus lolos verifikasi di seluruh provinsi. Sebelumnya, Partai Ummat dinyatakan tidak lolos, namun setelah menggugat ke Bawaslu, Partai Umat dinyatakan lolos dengan syarat melengkapi administrasi di Sulawesi Utara dan NTT yang masih belum lengkap. Dengan demikian ada 9 partai non parlemen yang ikut berkompetsisi 2024 nanti yakni, PSI, Perindo, PKN, Gelora, PBB, Hanura, Partai Buruh, Partai Garuda dan Partai Ummat. 9 partai ini akan meramaikan kontenstasi pemilu bersama dengan 9 partai parlemen yang ada di Senayan saat ini, yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

Partai Gelora Indonesia dan Partai Ummat sudah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi berjumlah 34 pengurus wilayah atau DPW, dengan kepengurusan sebanyak 514 kabupaten/kota (DPD) se-Indonesia. Partai Gelora Indonesia sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi pada tanggal 17 Desember 2019 yang dengan ikhtiarnya sudah membentuk kepengurusan di 15 kabupaten/kota se-provinsi Lampung, dengan 178 pengurus tingkat kecamatan. Partai Ummat memiliki struktur kepengurusan di 15 kabupaten/kota se-provinsi Lampung. Atas itulah Dewan DPW Partai Gelora Indonesia dan Partai Ummat Provinsi Lampung memiliki banyak upaya untuk memperkenalkan diri sebagai partai baru kepada masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan pada Partai Gelora dan Partai Ummat pada tingkat Provinsi Lampung untuk menjelaskan strategi kedua partai menuju Pemilu tahun 2024. Berdasarkan data Kpu.go.id (2023) Partai Gelombang Rakyat Indonesia Provinsi Lampung merupakan DPW dengan jumlah keanggotaan terbesar kelima di level nasional. Sama halnya dengan Partai Ummat Provinsi Lampung merupakan DPW dengan jumlah keanggotaan terbanyak ke delapan di level nasional. Kedua partai ini pun merupakan partai dengan keanggotaan terbanyak kedua di level pulau sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara (Lihat pada tabel 1.2 dan 1.3).

Tabel 1.2 Keanggotaan Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Urutan	Provinsi	Jumlah Anggota
1	Jawa Tengah	33,619
2	Jawa Timur	31,503
3	Jawa Barat	28,938
4	Sumatera Utara	15,929
5	Lampung	12,348
6	Papua	11,326
7	Sulawesi Selatan	11,132
8	Kalimantan Timur	10,025
9	Sumatera Barat	9,407
10	Sumatera Selatan	8,802

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023) dari Kpu.go.id (2023)

Tabel 1.3 Keanggotaan Partai Ummat

Urutan	Provinsi	Jumlah Anggota
1	Jawa Timur	76,481
2	Jawa Tengah	75,752
3	Jawa Barat	53,030
4	Sumatera Utara	39,234
5	Sulawesi Selatan	27,349
6	Banten	22,872
7	Aceh	22,595
8	Lampung	22,096
9	Sumatera Barat	18,143
10	Papua	17,885

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023) dari Kpu.go.id (2023)

Pendiri Partai Gelora di Provinsi Lampung merupakan para anggota Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI), sedangkan Ketua Partai Ummat Provinsi Lampung turut hadir pada Kongres V PAN di Kendari Sulawesi Tenggara Februari 2020. Dengan kedua alasan tersebut, peneliti meyakini bahwa kedua partai mampu memahami konflik yang terjadi pada DPP PKS dan PAN dan memahami proses pembentukan Partai Gelora dan Partai Ummat. Guna memperjelas penelitian mengenai perpecahan partai, peneliti mengutip beberapa wawancara dari masing-masing ketua partai maupun pengurus DPP Partai Gelora dan Partai Ummat melalui kanal media sosial.

Terdapat beberapa penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Penelitian sejenis dari Muchtar (2006) dengan judul persaingan partai politik lama dan baru dalam pemenangan pemilihan umum: Studi terhadap strategi

Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera dalam kemenangan Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kota Banda Aceh. Penelitiannya menjelaskan Strategi pemasaran politik PPP Kota Banda Aceh memfokuskan pada pemilih Islam saja, terutama terhadap pemilih tradisional. Strategi PKS memfokuskan pada perluasan kelompok pemilih, terutama terhadap pemilih pemula dan pemilih yang tidak memiliki ideologi politik.

Penelitian terkait dari Penelitian Abdullah As Syi' Abul Huda (2022) Konflik Antar Kelompok Dalam Kongres V Partai Amanat Nasional (Studi Terhadap Kelompok Pendukung Zulkifli Hasan dan Pendukung Mulfachri Harahap). Penelitiannya menjelaskan konflik terjadi antar kelompok disebabkan beberapa faktor seperti perebutan kekuasaan, perbedaan pandangan. Penelitian dari Lagabuana dkk (2021) dengan judul bertahan dan menang: strategi dan modal politik Sri Rahmi dalam Pemilihan Legislatif 2004-2019 di Sulawesi Selatan. Penelitiannya menjelaskan bahwa aktor politik lokal dapat terus bertahan dan menang dalam kontestasi di dapat dari strategi dan modal politiknya, meliputi kekuatan personalitas, jaringan sosial, dan partai politik. Penelitian sejenis dari penelitian Widyana (2022) dengan judul Strategi Partai Gelora sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 untuk Memenuhi *Parliamentary Threshold*. Hasil penelitiannya Partai Gelora harus berjuang agar mencapai *parliamentary threshold* dan memiliki basis dukungan masa yang banyak dengan strategi-strategi kolektif.

Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut yaitu dari teori yang digunakan, penelitian Muchtar (2006) menggunakan teori strategi pemasaran politik yang meliputi segmentasi, *targeting* dan *positioning*, sedangkan penelitian ini menggunakan teori strategi bersaing partai baru dari Paul Lucardie (2000) meliputi proyek politik, sumber daya partai, dan struktur peluang politik. Penelitian dari Penelitian Abdullah As Syi' Abul Huda (2022) menggunakan teori analisis fungsionalisme Lewis A. Coser. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan pembentukan partai politik dari Demirkol (2014).

Penelitian Lagabuana dkk (2021) menggunakan teori dari Pierre Bourdieu (1995) tentang habitus, modal dan arena untuk mempertahankan kekuasaan aktor politiknya. Perbedaannya, penelitian ini menganalisis strategi bertahan suatu partai menggunakan strategi survivalitas partai politik baru dari Migdal (1988) sebagai bentuk utama politik bertahan hidup pada Pemilihan Umum 2024 dengan cara mempertahankan dominasi, kontrol sosial maupun mobilisasi masyarakat. Penelitian Widyana (2022) menggunakan teori Giddens (2010) mengenai struktur dan *agency* untuk menjelaskan tentang hambatan dan pendorong Partai Gelora sebagai *agency* dalam menangani struktur yang ada. Sedangkan penelitian ini menggunakan strategi bersaing partai baru dari Paul Lucardie (2000) dengan melihat tantangan dan keberhasilan dari partai baru untuk dapat bersaing di Pemilihan Umum 2024.

Sebagai partai baru yang merupakan pecahan dari parpol belum dikenal oleh masyarakat luas, maka Partai Gelora dan Partai Ummat perlu berupaya untuk mendapat kepercayaan dari publik dan juga mendapat legitimasi politik (Bhayangkara, 2019). Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis komparasi kedua partai politik baru sebagai pecahan dari partai induknya (Partai Gelora dari Partai Keadilan Sejahtera) dan (Partai Ummat dari Partai Amanat Nasional) disebabkan oleh konflik internal partai politik dan menganalisis strategi politik yang dipilih kedua partai agar dapat *survive* dan bersaing pada Pemilihan Umum 2024 mendatang. Fokus kajian penelitian inilah sebagai bentuk *novelty* penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dilatarbelakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pembentukan Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Ummat?
2. Bagaimana strategi Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Ummat menuju Pemilihan Umum tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan ini akan menganalisis pembentukan Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Ummat sebagai partai baru akibat pecahan dari partai induk.
2. Penelitian ini akan menganalisis strategi Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Ummat menuju Pemilihan Umum tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi tambahan dalam ilmu politik mengenai fenomena kemunculan partai politik baru dalam Pemilu 2024 mendatang;

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, sebagai berikut

- 1) Berguna bagi sebagai bahan rujukan mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah mengenai strategi partai politik baru dalam Pemilu 2024.
- 2) Berguna memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung
- 3) Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait mengenai fenomena kemunculan partai politik baru di Indonesia pada Pemilihan Umum 2024 mendatang

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Partai Politik

2.1.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik memiliki peranan (*role*) dan posisi (*status*) penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa partai politik lah yang menentukan demokrasi di suatu negara. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Schattcheider, “*political parties created democracy*”. Dengan demikian, partai politik dapat dikatakan sebagai merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat perlembagaanya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, “*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*” (Schattschneider, 1975).

Negara modern yang menganut sistem demokrasi, ditandai dengan adanya partai politik yang diakui oleh negara, partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik berdasarkan ideologi masing masing, dan melakukan perkaderan ditingkat masyarakat sebagai persiapan untuk masuk dalam posisi pemerintahan (Efriza, 2019). Partai politik merupakan lembaga penting di dalam melakukan perkaderan ditingkat masyarakat, karena adanya hubungan langsung dengan masyarakat oleh karena terstruktur dari pusat hingga lokal pemerintahan (pemerintahan daerah). Selain adanya pengakuan dari negara sebagai lembaga politik juga memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga partai politik sangat penting dijadikan sebagai lembaga perkaderan, yang harus

senantiasa berjalan sesuai dengan karakteristik masing masing partai (Patawari dkk, 2019).

Para ilmuwan politik mendefinisikan partai politik umumnya bersifat normatif dan memiliki jawaban yang berbeda-beda dari masa ke masa. Tetapi, terdapat pendapat general partai politik yang berangkat dari pendapat bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Budiardjo, 2010).

Partai politik menurut Giovanni Sartori (1967) adalah “suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemeliharaan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk meduduki jabatan-jabatan publik” (Budiardjo, 2015:404). Menurut Firmanzah (2018:44) “partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non dalam sistem demokrasi modern”. Partai politik (Parpol) memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik.

Pendapat lainnya mengenai partai politik juga disampaikan oleh Efriza & Indrawan (2019:207) adalah “organisasi yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan”. Kata organisasi dan kekuasaan akan sangat mendominasi eksistensi dari sebuah parpol. Parpol tidak akan bisa merebut dan mendapatkan kekuasaan jika tidak bersifat kelompok (hanya individu) dan sebuah organisasi bukanlah parpol jika tujuan hidupnya bukan untuk kekuasaan.

Hadirnya partai politik dalam suatu demokrasi modern dapat dipahami sebagai meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik maka partai politik telah lahir, dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah (Efriza, 2019).

Pernyataan tersebut, sejalan dengan yang kemukakan oleh Cole (2013) bahwa pembentukan partai politik pada umumnya dikaitkan dengan upaya memperluas kepentingan dan pemerintahan representatif.

Selain definisi oleh para ahli, definisi partai politik diatur oleh Undang-Undang, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik) yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai partai politik, peneliti menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi perkaderan yang bertujuan merebut kekuasaan, berdasarkan visi misi dan atau tujuan melalui pelibatan seluruh kelompok masyarakat yang tergabung di dalamnya. Partai politik akan semakin penting karena demokrasi mensyaratkan wewenang warga untuk memerintah dan menjadi bagian dari hak warga berpartisipasi menentukan kebijakan publik dan pemimpin. Namun partai politik dibentuk tidak hanya untuk memerintah tetapi untuk menyalurkan keinginan dan merepresentasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat.

2.1.2 Pendekatan Pembentukan Partai Politik

Kehadiran partai politik sudah merupakan sebuah gejala yang umum diberbagai negara, terutama di negara yang mengaku menganut paham demokrasi. Studi tentang pembentukan partai baru berkisar pada tiga pendekatan utama: sosiologis, kelembagaan dan pilihan rasional (Bolin, 2010). Kajian tentang pembentukan partai baru yang menggunakan pendekatan sosiologis mempertimbangkan perubahan sistem

kepartaian dan pembentukan partai baru sebagai refleksi transformasi dalam struktur sosial yang mendasarinya. Oleh karena itu, pihak pecahan adalah diperkirakan akan meningkat ketika kekuatan sosial baru muncul. Pendekatan kelembagaan menarik perhatian fasilitator kelembagaan dan penghambat pembentukan partai baru, termasuk sistem pemilu, lokus kontrol diskresioner atas sumber daya, hubungan eksekutif-legislatif dan undang-undang yang mengatur partai politik.

Partai-partai pecahan diperkirakan akan muncul ketika faktor institusional bersifat permisif atau ketika desain kelembagaan diubah menjadi lebih permisif. Akhirnya, studi menggunakan perspektif pilihan rasional menggarisbawahi pentingnya aktor intrapartai (yaitu elit proto-partai) untuk pembentukan partai pecahan. Demikian, pengusaha politik yang beroperasi di bawah pasar pemilu yang tidak pasti berkembang strategi untuk meningkatkan kesempatan mereka memenangkan kursi. Pembentukan partai pecahan dianggap sebagai hasil interaksi antara elit proto-partai dan tuan rumah elit penguasa partai yang keputusannya dikondisikan oleh sinyal yang dikirim oleh pasar pemilu.

Studi menggunakan pendekatan sosiologis dan institusional fokus pada faktor eksogen kepada pihak tuan rumah untuk menjelaskan pembentukan partai baru tetapi mengabaikan peran elit proto-partai dalam perpecahan partai. Di sisi lain, perspektif pilihan rasional memberikan agensi kepada aktor intrapartai dalam memahami masuknya partai baru tanpa merongrong pentingnya fasilitator kelembagaan atau perubahan sosial-ekonomi pada partai politik. Bagian berikut akan berurusan dengan premis dari setiap pendekatan, faktor dalam menjelaskan perpecahan partai dan formasi partai pecahan serta kelemahannya dan kekuatan masing-masing pendekatan dan faktor.

1. Pendekatan Sosiologis dan Teori Perubahan Struktural

Partai memiliki dua fungsi utama. Pertama, mereka memiliki fungsi ekspresif. Artinya, mereka bertindak sebagai aliansi dalam konflik atas kebijakan dan komitmen nilai dalam tubuh yang lebih besar politik, yang mengembangkan retorika untuk ترجمahan kontras dalam sosial dan struktur budaya menjadi tuntutan dan tekanan untuk bertindak atau tidak bertindak. Kedua, mereka berperan penting dalam memaksa juru bicara untuk banyak kepentingan yang berlawanan dan pandangan untuk melakukan tawar-menawar, untuk mengejutkan tuntutan dan tekanan agregat (Lipset & Rokkan, 1967) dalam (Demirkol, 2014).

Uraian tentang transformasi struktur belahan didasarkan pada Pandangan Schumpeterian bahwa “keberhasilan institusi dan nilai-nilai kapitalis akan pada akhirnya membawa kematian organisasi dan moral kapitalisme dasar”. Dengan demikian, legitimasi partai politik, akan memudar saat mereka melakukan fungsinya. Sementara politik pihak sebagai lembaga memenuhi beberapa tuntutan, keberhasilan mereka dalam melakukan fungsi yang diatribusikan oleh pemilih, dalam jangka panjang, akan menantang basis mereka legitimasi karena perubahan struktural yang merupakan hasil dari ini institusi. Ketika partai-partai yang ada tidak tanggap terhadap kebutuhan perwakilan masyarakat, partai-partai baru diharapkan dibentuk untuk mengisi kekosongan tersebut (Demirkol, 2014).

Teori perubahan struktural mengusulkan arti-penting belahan baru sebagai faktor potensial munculnya partai-partai baru sebagaimana partai-partai mapan tidak responsif untuk memenuhi tuntutan baru. Mereka sangat menekankan apa yang dilakukan Hug (2001) menyebut masalah dorongan yaitu adanya permintaan yang diabaikan atau masalah baru yang memicu pembentukan partai baru. Namun, mereka gagal menjelaskan variasi ekspresi tuntutan baru di berbagai negara. Artinya, meskipun teori pasca-industrialis masyarakat dan nilai-nilai dapat menjelaskan perubahan dalam orientasi individu, preferensi dan kemampuan untuk terlibat dalam

aksi kolektif, mereka tidak memberikan penjelasan untuk kondisi dan peluang di mana nilai dan preferensi ini berada berubah menjadi partai politik baru. Dalam arti ini, transformasi dalam struktur pembelahan tidak secara otomatis sesuai dengan transformasi dalam sistem partai.

Lipset dan Rokkan dalam mempelajari partai politik disebut dengan Panebianco (1988) sebagai prasangka sosiologis yaitu meremehkan pentingnya faktor kelembagaan dan politik intrapartai. Persepsi partai politik sebagai produk perpecahan sosial membawa kita pada kesimpulan bahwa konflik intrapartai adalah hasil konflik antara perwakilan kelas sosial yang berbeda (Demirkol, 2014).

Masalah lain dengan pendekatan sosiologis adalah kurang jelas dalam menjelaskan perpecahan partai baru dan konflik intrapartai dalam demokrasi baru. Dalam hal ini kasus, struktur belahan kurang menonjol dibandingkan dengan faktor lain seperti pemilihan atau kinerja ekonomi. Manning (2005) menyatakan, partai-partai baru di akhir demokrasi sebagian besar muncul sebagai respons terhadap perubahan politik, bukan sosial-ekonomi. Dalam nada yang sama, McAllister & White (2007) menemukan bahwa partai politik di negara demokrasi baru kurang efektif dalam merepresentasikan perpecahan sosial. Karena ini, sosiologis pendekatan kurang jelas dalam demokrasi baru. Namun demikian, perubahan kelas sosial dan munculnya kelas baru sama sekali tidak relevan untuk pembentukan partai baru.

2. Pendekatan Kelembagaan dan Faktor Kelembagaan

Pendekatan ini melihat bahwa peran faktor kelembagaan dapat menjelaskan masuknya partai baru. Menurut pendekatan kelembagaan, konteks kelembagaan dan sejarah pengaturan di mana aktor mengoperasikan kondisi strategi dan keputusan aktor politik. Kajian antar variasi pada formasi baru pihak berurusan dengan

pentingnya faktor kelembagaan untuk pembentukan baru pihak di bawah pengaturan kelembagaan tertentu, sedangkan studi intra-variasi menunjukkan efek perubahan kelembagaan pada pembentukan partai baru di satu negara.

Studi tentang kohezi partai dan pergantian partai juga menggarisbawahi pentingnya faktor kelembagaan untuk kekompakan organisasi partai, biaya perbedaan pendapat dan untuk frekuensi dan arah pergantian partai. Sistem pemilu mungkin merupakan faktor institusional yang paling banyak dikutip menjelaskan kohezi partai, perubahan sistem partai dan pembentukan partai baru. Para ilmuwan politik menganalisis efek dari sistem pemilu menggarisbawahi pentingnya pemilu undang-undang, dan seperangkat aturan tentang aspek hukum pemilu (Baldini & Pappalardo, 2009). Undang-undang pemilu memiliki enam dimensi, termasuk hak untuk suara, hak pencalonan, daftar pemilih, lembaga yang bertanggung jawab atas pemilihan, prosedur untuk memberikan suara dan tata cara memilah pemenang dan pecundang pemilu (Baldini & Pappalardo, 2009). Meskipun sebagian besar sarjana memperhatikan dua yang terakhir dimensi, bekerja pada pembentukan partai baru memperkenalkan peraturan hukum tentang partai politik, tata cara pendaftaran surat suara, tata cara pencalonan dan tahap kampanye yang relevan untuk analisis. Faktor kelembagaan lain yang dikutip adalah jenisnya pemerintahan (*parlementerisme versus presidensialisme*) dan lokus kontrol diskresioner atas sumber daya (Demirkol, 2014).

3. Perspektif Pilihan Rasional dan Pembangunan Partai

Pendekatan pilihan rasional mempelajari pembentukan partai baru. Sejumlah studi tentang pergantian partai, Desposato (2006) dalam Demirkol (2014) juga membahas tentang perhitungan masing-masing legislator. Studi ini berangkat dari premis bahwa politisi adalah pengusaha ambisius yang tertarik untuk mencapai tujuan

tertentu, termasuk pemilihan ulang atau memenangkan kursi yang lebih tinggi (Strom & Müller, 2009). Namun, politisi menghadapi dilema kolektif, situasi di mana yang rasional tetapi tindakan anggota kelompok yang tidak terorganisir dapat mengarah pada hasil yang dipertimbangkan semua orang lebih buruk daripada hasil yang dapat dicapai dengan tindakan terorganisir (Cox & McCubbins, 2007).

Metode pemecahan dilema kolektif yang dihadapi politisi adalah penciptaan pos kepemimpinan yang menarik. Pemimpin memiliki tiga fitur penting (Cox & McCubbins, 2007) (1) Mereka menanggung biaya langsung untuk memantau masyarakat yang dihadapkan pada dilema kolektif, (2) mereka memiliki insentif selektif (hukuman dan penghargaan yang dapat ditargetkan secara individual) yang dapat digunakan untuk memberi penghargaan kepada mereka yang mereka temukan bekerja sama atau menghukum mereka yang mereka temukan "membelot" , dan (3) mereka dibayar, dengan berbagai cara, untuk layanan berharga yang mereka berikan.

Seperti halnya partai politik yang dibentuk oleh pengusaha politik yang menanggung biaya, partai baru dibentuk oleh proto-partai elit yang mengkoordinasikan mereka kegiatan anggota (Ceron, 2011). Sambil memilih strategi yang akan digunakan melawan kepemimpinan partai, pengusaha politik ini mengambil risiko dan potensi manfaat perbedaan pendapat dan pembentukan partai baru menjadi pertimbangan (Berrington, 1985 dalam Demirkol, 2014). Mereka terlibat dalam permainan strategis dengan pimpinan partai untuk menegakkan tuntutan hak mereka. Hasilnya, bagi Ceron (2011) tergantung pada titik fokus dan langkah strategis dan bagi Hug (2001), pada sifat permintaan dan potensi kekuatan partai potensial. Meskipun baik pimpinan partai maupun pembangkang faksi beroperasi dalam konteks politik bernama struktur peluang,

mereka jauh dari memiliki informasi yang sempurna tentang perilaku pemilihan atau tentang pilihan satu sama lain (Hug, 2001) dalam (Lago & Martínez, 2011). Untuk alasan ini, serupa struktur peluang berakhir dengan hasil yang berbeda. Dalam pengertian ini, meskipun struktur peluang membatasi aktor dengan kepentingan yang saling bertentangan, itu adalah perhitungan dan keputusan para aktor politik yang menjelaskan mengapa beberapa partai terpecah dan mengapa elit proto-partai membentuk partai baru daripada bergabung dengan partai yang sudah mapan.

Dengan demikian, kajian literatur tentang pembentukan partai baru menggunakan pendekatan sosiologis untuk mempelajari perpecahan partai terlalu menekankan pentingnya dorongan masalah. Pendekatan institusional untuk mempelajari pecahan pembentukan partai menggarisbawahi pentingnya kelembagaan fasilitator pecahan pembentukan partai. Kedua pendekatan tersebut berfokus pada faktor-faktor eksogen bagi pihak tuan rumah menjelaskan pembentukan partai baru tetapi mengabaikan peran elite proto-partai dalam partai perpecahan. Di sisi lain, perspektif pilihan rasional memberikan agensi kepada intrapartai aktor dalam memahami pintu masuk partai baru tanpa merusak pentingnya fasilitator kelembagaan atau perubahan sosial ekonomi pada partai politik.

2.1.3 Klasifikasi Sistem Kepartaian dan Tipe Partai Politik

Sistem kepartaian dan partai politik merupakan dua konsep yang berbeda. Sistem kepartaian menunjukkan format keberadaan antar partai politik dalam sebuah sistem politik yang spesifik. Disebut sebagai spesifik, oleh sebab sistem politik berbeda-beda di setiap negara atau di satu negara pun berbeda-beda dilihat dari aspek sejarahnya.

Tabel 2.4. Klasifikasi Sistem Kepartaian

Peneliti	Klasifikasi	Sistem Kepartaian
Maurice Duverger (1945)	Sistem Dwi Partai	Sistem Dwi Partai Sistem Multi Partai
	Kompetitif Oposisi	Kompetitif Murni Kompetitif Kooperatif Kompetitif Koalisi Koalisi Murni
Robert Dahl (1966)	Jumlah Partai dan Jarak	Sistem Dwi Partai Pluralisme Moderat Pluralisme Terpolarisasi Sistem Partai Berkuasa
Giovani Sartori (1976)	Ideologi	

Sumber: Labolo & Ilham (2015)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Duverger menjelaskan tipe sistem kepartaian berdasarkan kriteria jumlah partai politik di sebuah negara, sehingga ia menemukan dua. Duverger dan Blondel, Dahl membedakan sistem kerpartaian berdasarkan tingkat kompetisi dalam beroposisi, sehingga ia mengemukakan sistem kepartaian dengan kompetisi kuat, koperatif kompetisi, koalisi-kompetisi dan koalisi kuat. Dengan demikian, Maurice Duverger mengklasifikasikan menurut jumlah partai, Robert Dahl menurut skala kompetisi yang opositif, Giovani Sartori menurut jumlah partai dan jarak ideologi antar partai-partai tersebut. Klasifikasi Giovani Sartori sebagai klasifikasi yang paling tepat untuk digunakan. Alasannya, *pertama*, klasifikasi Sartori bersifat paling komprehensif dan bisa diterapkan pada kasus-kasus empiris (nyata). *Kedua*, klasifikasi ini bisa diterapkan di negara-negara dengan jumlah dan sistem kepartaian berbeda.

Secara umum klasifikasi dan sistem kepartaian dapat dibagi dua jenis yaitu partai massa dan partai kader (Mufti, 2012). Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan jumlah anggota, yang terdiri atas berbagai aliran politik dan kelompok. Sementara partai kader lebih menekankan pada kekuatan organisasi dan disiplin para anggotanya.

Menurut Labolo & Ilham (2015) berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya ini, partai politik dibedakan menjadi:

1. Partai kader

Partai kader adalah partai yang tidak menekankan kepada banyaknya jumlah anggotanya melainkan terfokus kepada pembentukan loyalitas dan disiplin anggotanya sehingga tercipta sebuah partai yang solid. Partai ini mengasumsikan bahwa dengan jumlah yang sedikit maka tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat dicapai. Biasanya partai kader ini juga disebut sebagai partai asas atau ideologi (Muhadam Labolo, 2015).

Partai kader sangat ditentukan oleh masyarakat kelas menengah yang memiliki hak pilih. Pada jenis ini, karakteristik serta pemberi dana organisasi masih sedikit, dan aktivitas yang dilakukan jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Selain itu, keanggotaan berasal dari kelas menengah ke atas, ideologi konservatisme ekstrem atau maksimal reformisme moderat, organisasi kecil, cenderung berbentuk kelompok informal. Partai Kader berbasis lokal dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai, dimana didukungnya bersumber dari hubungan klien dari elit-elit yang duduk dipartai (Caramani, 2017).

2. Partai massa

Partai ini muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat. Partai ini berada diluar lingkungan parlemen (ekstra parlemen). Ciri khas partai massa adalah berorientasi pada basis pendukung yang luas, seperti buruh, petani, kelompok agama, dan sebagainya. Katz & Crotty (2014) mengemukakan bahwa partai ini berbasiskan kelas sosial tertentu (lebih didasarkan identitas sosial ketimbang ideologi atau kebijakan), tetapi kerap tersingkirkan dari kebijakan negara (Caramani, 2017).

Partai ini memiliki ideologi yang cukup jelas dan organisasi yang rapi. Tujuan utama tidak hanya memperoleh suara dalam pemilu, tetapi memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elite yang direkrut dari massa. Partai jenis ini biasanya terdapat pada negara berkembang yang memiliki masalah dalam hal integrasi nasional. Contohnya adalah Partai Barisan Nasional Malaysia, yang merupakan gabungan antara kelompok Melayu, Cina, dan India. Di Indonesia, beberapa partai seperti PDI Perjuangan, PKB, PAN, dan PKS dapat kita kelompokkan ke dalam partai massa. PDI Perjuangan kerap mengidentifikasikan diri sebagai partai berbasis kelas sosial tertentu semisal "wong cilik" (Labolo & Ilham, 2015).

3. Partai *catch-all*

Partai ini merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa, yang tujuan utamanya adalah menerangkan pemilu dengan cara menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Partai *catch-all* dapat disebut partai *elektoral profesional* atau partai *rational-efficient* yakni partai yang mewakili kepentingan bangsa secara menyeluruh, dan berorientasi pada kemenangan Pemilu sehingga fleksibel dalam berganti-ganti isu kampanye politik (Caramani, 2017).

Di Indonesia contoh dari partai jenis ini adalah Partai Demokrat. Partai ini dinilai tidak mempunyai basis pemilih yang jelas. Seperti halnya partai massa, ketidakjelasan basis pemilihnya membuat Partai Demokrat harus sensitif terhadap isu-isu strategis di kalangan pemilih.

Menurut Katz & Crotty (2014) dan sebagaimana diulas dalam Caramani (2017), selain ketiga tipologi partai di atas, terdapat partai kartel, partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada suara

mereka ditingkat parlemen. Sebagai cara untuk mengatasinya, elite partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk bertahan. Dari sisi ini, ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir tak berarti lagi.

2.2. Konflik Internal Partai Politik

2.2.1. Konflik Internal Partai

1. Pengertian Konflik Politik

Konflik adalah sebuah salah satu esensi yang sering terjadi dalam kehidupan manusia dengan memiliki berbagai karakteristik yang cukup beragam. Diantara karakteristik manusia tersebut diantaranya adalah strata sosial dan ekonomi, perbedaan jenis kelamin, sistem hukum, budaya, agama, suku, kepercayaan, aliran politik, bahkan tujuan hidup yang berbeda-beda.

Konflik sangat memengaruhi performa kinerja sumber daya manusia karena konflik merupakan energi yang mampu menggerakkan anggota-anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu konflik juga akan menjadi kekuatan apabila bersifat fungsional yang artinya konflik mampu mengangkat isu tentang persoalan yang menghambat organisasi. Kemudian ketika terdapat masalah dan diberikan sebuah solusi, maka konflik yang terjadi akan berdampak pada perbaikan kapasitas kinerja sumber daya manusia organisasi itu sendiri (Juliantara, 2021) dalam (Navasari & Nuralim, 2022).

2. Penyebab Konflik

Timbulnya konflik kepentingan menurut Dahrendorf, berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi dalam hal mana para penghuni mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta

terdapat posisi lain dimana para penghuni menjadi sasaran perintah demikian itu (Pruitt & Rubin, 2004).

Menurut Maurice Duverger, penyebab terjadinya konflik adalah: (1) Sebab-sebab individual. Sebab-sebab individual seperti kecenderungan berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada. (2) Sebab-sebab kolektif, adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya. Maswadi Rauf juga mengemukakan bahwa konflik terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber posisi yang langka (*resource and position scarcity*) (Rauf, 2001).

3. Konflik Internal Partai Politik

Konflik di dalam partai politik tidak hanya berasal dari perebutan kekuasaan tetapi juga dari perselisihan antar faksi. Konflik internal partai politik bukan hanya karena perebutan kekuasaan tetapi juga karena faktor faksionalisme. Zariski (1960) mengartikan faksi sebagai kelompok intra-partai, dimana anggotanya memiliki identitas dan tujuan yang sama, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan faksi sangat beragam, termasuk: mempertahankan patronase dan kontrol faksi atas partai, mempengaruhi strategi dan kebijakan partai, serta mengusulkan serangkaian nilai baru kepada partai. Selanjutnya ia mengatakan ada dua elemen penting dari faksi, yakni: (1) sub-kelompok yang menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar, dan (2) sub-kelompok dipersatukan oleh identitas dan tujuan yang sama (Romli, 2018).

Ian McAllister (1991) mengatakan bahwa faksi sebagai kekuatan-kekuatan yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh dari institusi-institusi penting di dalam kepengurusan partai mengenai perumusan kebijakan partai dan penentuan kandidat untuk mengisi jabatan politik di partai maupun pemerintahan (Romli, 2018). Sebagai sebuah faksi politik, kelompok tersebut bersaing dengan lawan-lawannya untuk memperoleh keuntungan kekuasaan di dalam kelompok yang lebih luas, di mana mereka menjadi bagian di dalamnya.

Sehubungan dengan itu Hine (2013) berpendapat bahwa faksi akan menjadi faktor konflik internal partai manakala ikatan antar faksi partai lebih dipengaruhi oleh kepentingan individu/kelompok dibandingkan oleh adanya kesamaan gagasan (Romli, 2018). Faksi di dalam partai politik dapat mencerminkan berbagai kombinasi motif yang berbeda, seperti perbedaan ideologi atau isu, perbedaan sosial dan budaya, dan pertarungan kepemimpinan pribadi. Meskipun biasanya istilah ini dianggap sebagai kebalikan dari istilah kohesi, kita melihat bahwa faksionalisme di dalam partai sebagai sesuatu yang konstruktif.

Konflik internal partai politik bisa terjadi disebabkan oleh faktor pilihan koalisi. Koalisi, yang merupakan kesepakatan atau aliansi di antara partai-partai politik untuk tujuan dan membangun pemerintahan bersama, tidak akan terjadi konflik di antara partai-partai politik. Namun untuk kasus Indonesia, konflik internal partai politik terjadi justru akibat pilihan koalisi. Bisa jadi konflik internal tersebut muncul karena pilihan koalisi tersebut bukan didasarkan oleh kesamaan ideologi atau platform partai tetapi karena kepentingan jangka pendek (Romli, 2018)

Dalam aktivitas organisasi, dijumpai bermacam-macam konflik yang melibatkan individu-individu maupun kelompok-kelompok.

Beberapa kejadian konflik telah diidentifikasi menurut jenis dan macamnya oleh Polak, M. (1982) dalam Wahyudi (2011) dalam (Asmadianto & Nurmandi, 2015) membedakan konflik menjadi 4 jenis yaitu, (1) konflik antar kelompok, (2) konflik intern dalam kelompok, (3) konflik antar individu untuk mempertahankan hak dan kekuasaan, dan (4) konflik intern individu untuk mencapai cita-cita. Penelitian ini mengidentifikasi jenis-jenis konflik dalam organisasi dan oleh peneliti di inpresentasikan dalam organisasi politik (partai politik) yaitu; konflik antar partai lama dengan partai baru (Partai Gelora sebagai pecahan PKS) dan (Partai Ummat pecahan dari PAN). Penelitian ini berhipotesis bahwa partai baru terbentuk atas konflik internal partai induknya.

2.2.2. Pemetaan dan Manajemen Konflik Internal Partai

1. Pemetaan Konflik

Pemetaan konflik adalah salah satu teknik yang dipakai untuk merepresentasikan konflik dalam bentuk gambar (grafis) dengan menempatkan para pihak yang terlibat dalam konflik baik dalam hubungannya dengan masalah maupun antar para pihak sendiri. Ketika orang dengan titik pandang yang berbeda memetakan situasi mereka bersama-sama, mereka belajar tentang pengalaman dan persepsi orang lain.

Pemetaan konflik merupakan hal yang sangat penting dalam upaya penyelesaian konflik. Ada beberapa pendapat ahli terkait pemetaan konflik seperti Fisher (2001), dan Amr Abdalla (2002), seperti yang dikutip Susan (2009). Menurut Fisher, pemetaan konflik memberi gambaran awal mengenai berbagai sikap, perilaku dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Pemetaan konflik ini meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak

dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling memperelajari pengalaman dan pandangan masing-masing.

Pendekatan analisa konflik untuk menemukan dan mencapai penyelesaian konflik dilakukan melalui model SIPABIO menurut Abdalla (2002) dalam Susan (2009), terdiri dari:

1. *Source* (sumber konflik).

Konflik disebabkan oleh sumber-sumber yang berbeda sehingga melahirkan tipe-tipe konflik yang berbeda. Jika kita kembali pada analisis sosiologi konflik, berbagai sumber konflik tersebut bisa muncul dari model hubungan sosial (analisis konstruksi sosial), nilai-nilai seperti identitas dan agama (analisis Coser), dan dominasi struktural (analisis struktural positivis dan kritis).

2. *Issues* (isu-isu). Isu menunjuk pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak bertikai. Isu ini dikembangkan oleh semua pihak bertikai dan pihak lain yang tidak teridentifikasi tentang sumber-sumber konflik.

3. *Parties* (pihak). Pihak berkonflik adalah kelompok yang berpartisipasi dalam konflik baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan, dan pihak tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan konflik. Pihak tersier ini yang sering dijadikan sebagai pihak netral untuk mengintervensi konflik.

4. *Attitudes/felling* (sikap). Sikap adalah perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Sikap bisa muncul dalam bentuk yang positif dan negatif bagi konflik.

5. *Behavior* (perilaku/tindakan). Perilaku adalah aspek tindak sosial dari pihak berkonflik, baik muncul dalam bentuk *coercive action* dan *noncoercive action*.

6. *Intervention* (campur tangan pihak lain). Intervensi adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian.
7. *Outcome* (hasil akhir). Outcome adalah dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi.

2. Manajemen Konflik

Menurut Ross (1993) manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diperlukan para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka menyelesaikan perselisihan kearah yang menghasilkan hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif yang saling menguntungkan diantara beberapa pihak. Manajemen konflik juga dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerja sama dalam memecahkan masalah atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik (NB, 2021)

Tosi dkk dalam Wahyudi (2011) mengartikan manajemen konflik dalam organisasi menjadi tanggung jawab pimpinan (*manajer*) baik pimpinan tingkat lini (*supervisor*), tingkat menengah (*middle manager*), dan pimpinan tingkat atas (*top manager*), maka diperlukan peran aktif dalam untuk mengarahkan situasi konflik agar tetap produktif. Selanjutnya, dalam manajemen konflik (pengelolaan konflik) dikenal dengan istilah Rekonsiliasi, Arbitrasi, dan Transformasi elemen konflik.

1. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi merupakan proses resolusi konflik yang mengubah konflik menjadi damai. Dimana terdapat kesadaran kedua pihak bahwa konflik yang berlarut-larut akan memakan biaya lebih banyak dan sia-sia. Faktor masa lalu menjadi vital untuk mengetahui akar konflik yang digunakan untuk menghilangkan

potensi konflik dan menjalin hubungan yang lebih harmonis pada waktu yang mendatang (Whittaker, 1999).

2. Arbitrase

Menurut Christopher A. Moore (2003) dalam Wirawan (2010) arbitrase merupakan istilah umum proses penyelesaian konflik sukarela di mana pihak-pihak yang terlibat konflik meminta bantuan pihak ketiga yang imparial (tidak memihak) dan netral untuk membuat keputusan mengenai objek konflik. Keluaran dari keputusan arbitrase bisa bersifat nasihat dan tidak mengikat atau bisa juga berupa keputusan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat konflik.

3. Transformasi elemen konflik.

Elemen konflik adalah semua faktor dari konflik yang meliputi antara lain: penyebab konflik, gaya manajemen konflik, kekuasaan yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik dan sebagainya. Persepsi pihak yang terlibat konflik mengenai elemen-elemen konflik ini berbeda sehingga konflik bisa berlangsung secara berkepanjangan. Elemen-elemen tersebut perlu ditransformasikan sehingga pihak yang terlibat konflik mempunyai persepsi yang sama atau paling tidak saling mendekati (Wirawan dalam Asmadianto & Nurmandi, 2015).

Selain berfokus pada strategi partai politik, penelitian ini akan menyinggung sedikit proses pembentukan partai politik baru yaitu Partai Gelora Indonesia dan Partai Ummat, peneliti berasumsi bahwa pembentukan partai politik baru yaitu Partai Gelora dan Partai Ummat dapat dikatakan sebagai manajemen konflik, dengan alasan pelembagaan parpol masih rendah sehingga memutuskan untuk mendirikan partai politik baru. Argumen sementara ini berdasarkan pada konsep manajemen konflik yang dikenal sebagai metode yang digunakan orang-orang maupun sebuah kelompok dalam menangani perselisihan.

2.3. Strategi Partai Politik Baru

2.3.1. Pengertian Strategi

Strategi sendiri menurut Moertopo (1974) merupakan keseluruhan rencana tentang tindakan dan keputusan yang bersifat intuitif, kesatuan dasar dan tujuan rencana memberikan warna atau ciri terhadap strategi tersebut. Strategi berasal dari pemikiran-pemikiran orang yang memiliki satu tujuan yang secara garis besarnya sama. Susanti dkk (2021) dalam Widyana (2022) menyebutkan ciri strategi perebutan kekuasaan di tingkat desa diantaranya ialah memanfaatkan sumber daya kemampuan pribadi, kekayaan dan jaringan kekerabatan.

Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan, yakni “kemenangan”. Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandate, dalam perolehan tambahan suara, dalam sebuah kemenangan pemilu bagi kandidat atau dalam memperoleh suara mayoritas untuk pemberlakuan suatu peraturan atau kebijakan. Bagaimana kemenangan itu digunakan, itulah tujuan politik yang ada dibalik hasil yang muncul dipermukaan (Schroder 2013).

Strategi politik menurut Schroder (2009) merupakan strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Dalam pemilu strategi politik perlu digunakan untuk memenangkan persaingan politik. Agar suatu kontestan dapat memenangkan pemilihan umum, calon kandidat harus dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suara kepadanya (Syahda & Rafni, 2021). Terdapat tiga strategi politik yang harus dilakukan oleh seorang kandidat menurut Firmanzah, (2011) yaitu: strategi penguatan; strategi menanamkan keyakinan; dan strategi pengenalan dan merebut. Ketiga strategi tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk meraih kemenangan dalam kontestasi politik.

2.3.2. Model-Model Strategi

Menurut Peter Schroder (2009) strategi dibedakan menjadi dua model, strategi ofensif dan defensif dalam menembus pasar politik:

1. Strategi Ofensif

Strategi ofensif adalah strategi yang memperluas pasar dan menembus pasar. Dalam strategi ofensif yang digunakan untuk mengimplementasikan politik, yang harus dijual adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan. Strategi ini sangat dibutuhkan, misalnya apabila suatu partai ingin menambah atau meningkatkan jumlah massa pemilihnya. Dalam hal ini harus ada banyak orang yang memiliki pandangan dan pemikiran yang positif terhadap partai tersebut, sehingga nantinya kampanye yang akan dilaksanakan partai politik akan dapat berhasil.

1) Strategi Memperluas Pasar

a. Kampanye Pemilihan umum

Strategi perluasan pasar secara ofensif dalam sebuah pemilu bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru di samping para pemilih tradisional (tetap) yang telah ada. Oleh sebab itu, harus ada penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing. Strategi semacam ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye, untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru dan penawaran mana saja yang lebih baik dibandingkan partai lainnya (Syahda & Rafni, 2021). Bagi partai sendiri, persyaratan berikut harus dipenuhi dan konsekuensinya harus dipertimbangkan:

- a) Platform partai harus disertakan dan melengkapi program yang baru
- b) Bersamaan dengan ditampilkannya program baru, profil partai juga akan berubah. Karena itu, profil yang baru harus

tetap dapat diterima oleh pemilih lama, sehingga bertambahnya jumlah pemilih baru tidak diiringi oleh hilangnya lama, atau jumlah pemilih

- c) Orang-orang tertentu harus selaras dengan program tertentu. Orang-orang tersebut harus menampilkan keselarasan program dan individu.
- d) Program atau isu baru tidak dapat dimunculkan secara tiba-tiba. Sebelumnya para pemegang jabatan atau wakil rakyat yang terpilih harus sudah dipersiapkan melalui program pengembangan SDM.

b. Implementasi Politik/Kebijakan

Dalam hal ini keuntungan yang dihasilkan politik baru harus lebih diperhatikan. Untuk itu politik harus dijelaskan secara jelas. Dalam hal ini pihak eksekutif sering kali bertindak salah karena keuntungan yang ditawarkan tidak dirumuskan secara jelas sehingga tidak dapat dimengerti warga. Sebelum pelaksanaannya perlu dilakukan hubungan kemasyarakatan yang baik untuk menghindari diskriminasi sewaktu-waktu (Syahda & Rafni, 2021). Dalam kasus ini, produk baru yang ditawarkan, yakni kebijakan baru atau lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan oleh kebijakan baru tersebut perlu dipropagandakan. Oleh karena itu pertama-tama kebijakan tersebut harus dirumuskan secara jelas. Kebijakan yang belum rampung sama tidak menariknya dengan produk yang belum rampung.

2) Strategi Menembus Pasar

Strategi ini menggali potensi yang telah ada secara optimal. Contohnya adalah pemasaran program-program yang dimiliki secara lebih baik dan peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu, contohnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok target. Jelasnya, strategi menembus pasar

bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan penggalan potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau penggalan bagian yang dimiliki kelompok target dimana keberhasilan telah diperoleh sebelumnya.

2. Strategi defensif

Muncul apabila partai pemerintahan atau koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai yang ingin mempertahankan mayoritasnya dan membawa keuntungan sebanyak mungkin. Dalam strategi defensif disebut sebagai strategi mempertahankan pasar. Strategi ini merupakan suatu strategi yang khas untuk mempertahankan mayoritas pemerintah. Dalam kasus semacam ini, partai akan memelihara pemilih tetap mereka, dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman mereka sebelumnya pada situasi yang berlangsung. Partai yang ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap yang bertentangan dengan partai-partai yang menerapkan strategi ofensif. Dalam hubungannya dengan aliansi, partai-partai yang menerapkan strategi defensif menjalankan sebuah pemeliharaan secara intensif terhadap multipikator yang ada serta menawarkan insentif kepada mereka (Syahda & Rafni, 2021).

2.3.3. Strategi Kebaruan Politik Baru

1. Kebaruan Partai Politik

Hadirnya partai baru dalam kompetisi pemilu 2024 membuat ruang persaingan menjadi ketat karena masing-masing partai akan saling memperebutkan pasar pemilih. Partai baru akan berhadapan dengan partai lama yang cenderung bisa mempertahankan eksistensinya dibuktikan melalui keberhasilan meraih kursi di parlemen. Barnea & Rahat (2010) memberi kerangka perspektif untuk membedakan kebaruan partai dengan partai lama:

1. Aspek partai di kontes elektoral

Aspek ini meliputi label partai (*party label*), seperti apakah nama partai benar-benar baru; ideologi (*ideology*), yakni seberapa berbeda platform atau program partai baru dengan partai lama; dan pemilih (*voters*), yakni seberapa berbeda basis dukungan atau basis sosial pemilih berbeda dengan partai lama.

2. Aspek partai sebagai organisasi

Aspek ini meliputi status legal-formal partai, institusi, dan aktivitas partai. Aktivitas partai merujuk pada apakah partai baru memiliki aktivis partai yang baru atau aktivis pindahan dari partai lama.

3. Aspek partai di pemerintahan

Aspek ini meliputi dua kriteria yakni, perwakilan, terkait tentang siapa kandidat perwakilan atau kandidat legislatifnya, apakah orang baru atau sebagian berasal dari partai lama; dan kriteria kebijakannya, terkait seberapa berbeda kebijakan partai baru dan partai lama.

Selain kerangka perspektif pembeda partai baru dengan partai lama, Sikk (2011) menekankan pentingnya kebaruan dalam hal ini apakah partai benar-benar berbeda, dalam hal ini ideologi maupun program-programnya dengan partai-partai lama menjadi salah satu formula keberhasilan partai baru. Zúborová (2015) menilai bahwa salah satu alasan kemunculan dan keberhasilan partai politik baru bergantung pada kemampuan untuk mempromosikan ide-ide, yang meskipun lama, namun dengan cara baru atau model baru. Ia juga melihat bahwa aspek pemimpin partai juga memiliki pengaruh dalam menentukan keberhasilan partai baru (Hanafi, 2018).

2.3.4. Strategi Bersaing Partai Politik Baru

Paul Lucardie (2000) menyatakan terdapat tantangan dan keberhasilan dari partai baru untuk dapat bersaing kompetisi pada pemilu setidaknya dapat dikaitkan dengan:

1. Proyek Politik

Proyek politik merupakan upaya partai dalam menangani masalah-masalah yang mendesak sebagian besar pemilih. Dalam hal ini, Partai Gelora dan Partai Ummat sebagai partai baru menangkalkan masalah-masalah tersebut menjelang pemilu 2024. Tujuannya agar pemilih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga di sini, peneliti melakukan kajian mengenai permasalahan yang ada dalam partai politik baru, di antaranya ideologi program partai baru yang dibawa oleh Partai Gelora dan Partai Ummat yang berbeda dengan partai lama, yaitu PKS dan PAN.

2. Sumber Daya Partai

Menurut Paul Lucardie (2000) sumber modal berkaitan dengan anggota partai, modal yang digunakan oleh partai, manajemen, dan publikasi media massa. Menurut (Haryanto, 2017), sumber daya (*resource*) sebagai modal untuk menjadikan diri berpengaruh di tengah masyarakat, dimana terdapat banyak ragam sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh dan mengelola pengaruh. Kemudian, membagi menjadi empat jenis sumber daya, yaitu (a) sumber daya ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan aset dan uang, (b) sumber daya sosial mencakup jejaring dengan berbagai pihak, (c) sumber daya kultural mencakup kepemilikan atas sejumlah pengetahuan (*knowledge*), dan (d) sumber daya koersif mencakup kepemilikan instrumen untuk melakukan intimidasi, pemaksaan, bahkan adanya tindak kekerasan fisik.

3. Struktur Peluang Politik

Struktur peluang politik berkaitan dengan kondisi kelembagaan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya (Lucardie, 2000). Faktor-faktor ini mempengaruhi secara berbeda dan tergantung jenis partai baru. Peluang politik terdiri dari memiliki dukungan dengan partai politik, mendapat dukungan dari masyarakat, pemimpin yang memiliki

kemampuan komunikasi politik di depan publik, dan memiliki jaringan sosial dengan penguasa lain (Haboddin, 2017).

Penelitian ini menjelaskan strategi bersaing partai baru tantangan dan keberhasilan dari partai baru untuk dapat bersaing kompetisi pada pemilu tahun 2024 menggunakan Paul Lucardie (2000) meliputi proyek politik, sumber daya partai, dan struktur peluang politik.

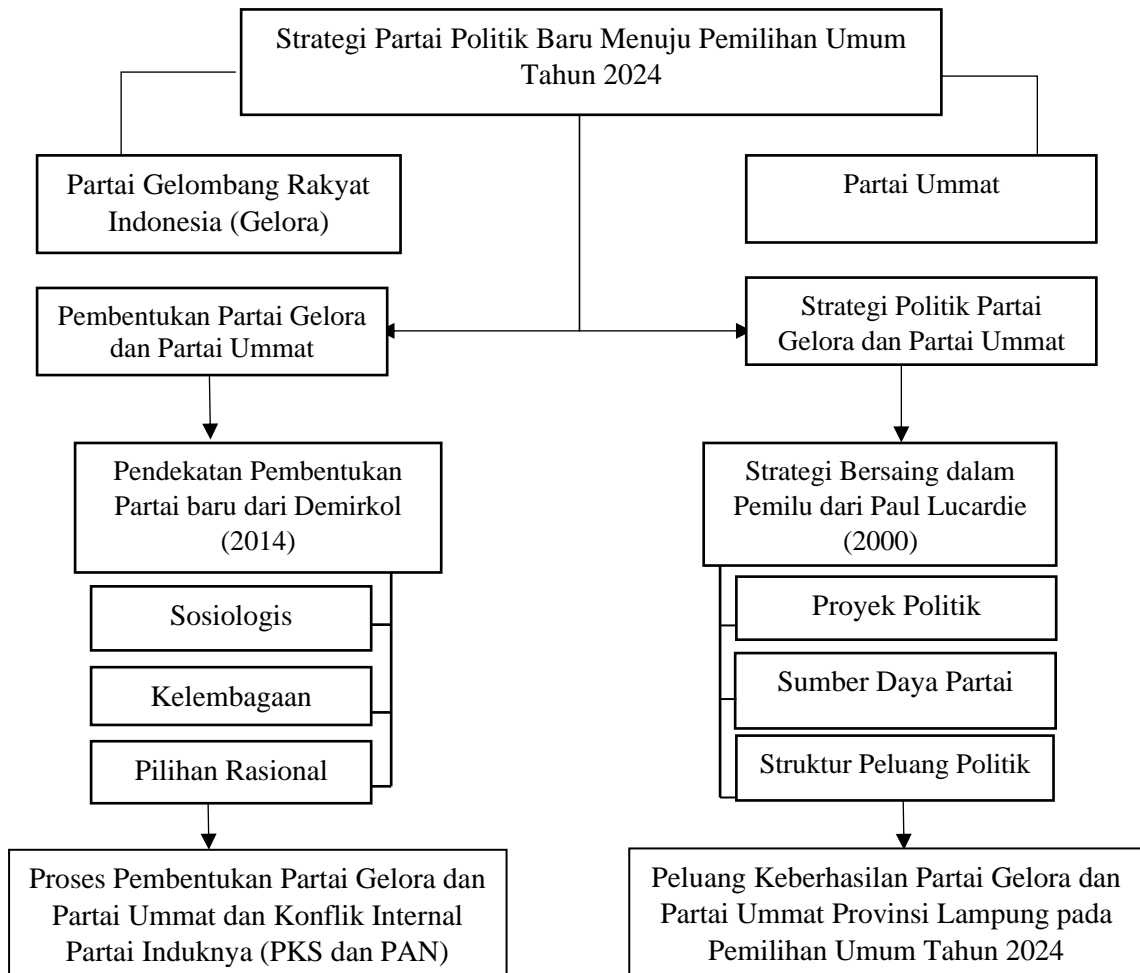
2.4. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Strategi Partai Politik Baru Menuju Pemilihan Umum 2024” dengan mengidentifikasi objek penelitian terlebih dahulu. Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah partai-partai politik pendatang baru pada Pemilu 2024 yaitu Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia dan Ummat sebagai partai yang terbentuk akibat dari perpecahan internal partai. Penelitian ini mengkaji strategi politik yang dipilih Partai Gelora dan Partai Ummat agar dapat *survive* dan bersaing dari partai induknya yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional maupun partai lama (PDIP, Golkar, dll) dalam memenangkan dukungan publik pada Pemilihan Umum 2024.

Penelitian ini membahas proses pembentukan partai politik baru, Partai Gelora dan Partai Ummat. Pembentukan partai baru ini terkait konflik yang terjadi internal PAN dan PKS, yang menyebabkan pembentukan partai baru dengan menganalisis menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan kelembagaan atau pendekatan pilihan rasional. Selain itu, penelitian ini menganalisis kebaruan yang ditawarkan oleh partai baru dengan menggunakan konsep kebaruan dari Barnea & Rahat (2010) untuk membedakan kebaruan partai dengan partai lama meliputi Aspek partai di kontes electoral, aspek partai sebagai organisasi, dan aspek partai di pemerintahan.

Penelitian ini menjelaskan strategi bersaing partai baru tantangan dan keberhasilan dari partai baru untuk dapat bersaing kompetisi pada pemilu

menggunakan Paul Lucardie (2000) meliputi proyek politik, sumber daya partai, dan struktur peluang politik. Berikut bagan kerangka pikir penelitian ini:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir
Sumber : Diolah Peneliti (2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan Bogdan dan Taylor dalam Moleong & Lexy (2017:4):

“sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan beberapa uraian definisi metode kualitatif diatas, pada penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap kondisi dan fenomena kehadiran partai politik pendatang baru, maka teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan. Analisis yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi

hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna, Makna disini adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Terdapat tiga alasan peneliti memilih metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. *Pertama*, karena fenomena yang diteliti mengenai kehadiran partai politik pendatang baru pada Pemilu tahun 2024 memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan yang bersifat mendalam karena pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. *Kedua*, penelitian ini membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dengan metode wawancara. Melalui variabel-variabel yang ditemukan dan memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan dari objek yang diteliti. *Ketiga*, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk menjawab serta menggambarkan bagaimana Pembentukan dan Strategi Partai Politik Gelora Indonesia dan Partai Ummat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan membutuhkan informasi yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumen.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian me mberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini memiliki dua berfokus yang akan di analisis pada bab pembahasan, meliputi:

1. Pembentukan partai politik baru sebagai pecahan dari partai induknya (Partai Gelora dari Partai Keadilan Sejahtera) (Partai Ummat dari Partai Amanat Nasional), dengan menggunakan pendekatan pembentukan partai politik menurut Demirkol (2014).
2. Penelitian ini mengkaji strategi politik yang dipilih Partai Gelora dan Partai Ummat dalam memenangkan dukungan publik pada Pemilihan Umum 2024. Penelitian ini menganalisis strategi bersaing partai baru tantangan dan keberhasilan dari partai baru untuk dapat bersaing kompetisi pada pemilu menggunakan Paul Lucardie (2000) meliputi proyek politik, sumber daya partai, dan struktur peluang politik.

3.3. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif, responder atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Pada dasarnya diambil dari kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian ini merupakan sumber yang memberikan informasi tentang data atau hal-hal yang diperlukan oleh peneliti terhadap penelitian yang dilaksanakan subjek dalam peneliti ini adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda atau lembaga. Menurut Moleong dan Lexy (2017) informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Informan adalah orang yang memberikan informasi maupun keterangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut, misalnya

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dan kita teliti (Sugiyono, 2019).

Mengutip dari pendapat Spradley dalam Sugiyono (2019) bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimina informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menarik untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Terdapat beberapa identitas informan dalam hasil dan pembahasan di anonimkan dikarenakan informasi yang sampaikan bersifat *sensitive* atau tidak mendapat persetujuan untuk mencantumkan nama informan. Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti menetapkan beberapa macam informan, diantaranya yaitu :

Tabel. 3.5 Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Waktu
1	Abdullah Fadri Auli	Ketua Partai Ummat Provinsi Lampung	9 November 2022
2	Samsani Sudrajat	Ketua Partai Gelora Provinsi Lampung	23 November 2022
3	Faisal Husni	Anggota Partai Ummat Provinsi Lampung	29 Desember 2022
4	Wahyu Agung Putra	Anggota Partai Gelora Provinsi Lampung	29 Desember 2022
5	Sponada	Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung	1 November 2022
6	Vittirio Dwison	Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung	2 Desember 2022
7	Eliyas	KAMMI Provinsi Lampung	1 Desember 2022

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen data (Sugiyono, 2019). Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, jurnal artikel, serta situs di internet yang bersangkutan dengan penelitian

yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti yaitu sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembentukan partai politik baru dari pecahan partai induk dan strategi politik partai pendatang baru dalam meraup suara pemilih dalam pemilu tahun 2024 mendatang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan peneliti adalah mengumpulkan data. Tanpa teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi menurut Suharsaputra (2014) sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016). Sementara Nazir dalam Sugiyono (2019) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah dengan teknik wawancara tatap muka (*face to face interview*). Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi-terstruktur (*semistructure interview*) atau wawancara *in depth interview*, yakni pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Wawancara mendalam merupakan suatu interaksi atau pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan. Wawancara jenis ini

memberi peluang peneliti untuk mengembangkan pertanyaan pertanyaannya dengan tetap memperhatikan fokus pembicaraan (Manzilati, 2017).

Teknik maupun pelaksanaan wawancara dilakukan di sekretariat partai politik yang dituju terutama kepada ketua maupun beberapa kader partainya. Peneliti mengadakan wawancara setelah ada kesepakatan waktu dengan responden. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan terlebih dahulu menentukan sejumlah informan, sesuai dengan kompetensinya dalam rangka memperoleh data mengenai strategi Partai Gelora Indonesia dan Partai Ummat pada Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang.

2. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan pancra indra lainnya. Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi, dimaksud sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan peneliti (Bungin, 2015).

Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipatif (*nonparticipatory observation*), yaitu peneliti tidak ikut serta dalam setiap kegiatan di Partai Gelora maupun Partai Ummat, peneliti hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan. Pada observasi non partisipan ini, peneliti hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Pemilihan teknik jenis ini dilakukan agar peneliti dapat lebih fokus dalam melakukan pengamatan terhadap objek yang sedang diamati sehingga data observasi yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi yang sedang diamati. Peneliti pun sebelumnya sudah melakukan pra riset,

dengan demikian peneliti menggunakan observasi sistematis atau observasi berkerangka (*structured observation*) adalah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya (Hardani dkk, 2020).

Pemilihan observasi dalam pengumpulan data pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Dengan dilakukannya observasi untuk mendapatkan data-data melalui pengamatan yang dilakukan diluar proses wawancara sebagai data tambahan di dalam data primer penelitian. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi dan mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan (Bungin, 2015).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

Alasan menggunakan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti : gambaran umum partai politik, struktur organisasi partai politik Gelora dan Ummat, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya. Dengan demikian, metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh, selanjutnya tahap yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data terdiri dari:

1. Editing Data

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Proses editing data dilakukan oleh peneliti dengan mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik. Beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan editing data adalah:

- 1) Peneliti melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan dalam panduan wawancara
- 2) Peneliti melengkapi data-data yang sudah diperoleh tetapi belum dituliskan pada tempat yang telah disediakan dalam panduan wawancara
- 3) Peneliti memperhatikan kelengkapan pengisian jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, serta kesesuaian antar jawaban yang telah ada dalam panduan wawancara
- 4) Peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul.

Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisa data. Dengan adanya klarifikasi ini diharapkan masalah teknis atau konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisis sehingga dapat menimbulkan bias penafsiran hasil analisis. Hal ini berkaitan dengan

apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisa. Konsistensi mencakup keajegan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan. Kelengkapan mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian tersebut.

2. Interpretasi data

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia. Peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menginterpretasikan data dengan benar:

1) Pengumpulan Data

Tahap ini dalam interpretasi data adalah mengumpulkan semua data yang relevan. Peneliti melakukan ini dengan terlebih dahulu memvisualisasikannya dalam gambar dan tabel. Langkah ini bertujuan untuk menganalisis data secara akurat dan tanpa bias.

2) Mengembangkan Temuan

Peneliti memeriksa data secara menyeluruh kemudian peneliti mengembangkan temuan yang didapat dari hasil penelitian di Partai Gelora dan Partai Ummat. Peneliti membandingkan dan menyelaraskan kumpulan data yang didapatkan di lapangan dengan kumpulan data penelitian yang serupa. Tujuan langkah ini adalah untuk membandingkan deduksi ini sebelum menarik kesimpulan apa pun.

3) Menarik Kesimpulan

Peneliti mengembangkan temuan dari kumpulan data Peneliti, Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang peneliti temukan di Partai Gelora dan Partai Ummat.

4) Memberikan Rekomendasi

Tahap terakhir, peneliti memberikan rekomendasi atau saran penelitian. Rekomendasi atau saran adalah ringkasan dari temuan dan kesimpulan peneliti. Dalam hal ini terdapat ada dua pilihan untuk rekomendasi yaitu peneliti merekomendasikan tindakan atau menyarankan penelitian tambahan.

3.7. Teknik Analisis Data

Pendekatan kualitatif sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif, terutama dalam menyajikan data (Hardani dkk, 2020). Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong & Lexy (2017: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis menurut Miles. dkk (2014:16) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dapat menyederhanakan dan metransformasikan data kualitatif dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya (Hardani dkk, 2020).

Proses reduksi ini, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis oleh peneliti baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi,

kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya atau disesuaikan dengan fokus penelitian ini mengenai strategi partai politik baru menuju Pemilihan Umum tahun 2024, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan. Hasil reduksi data penelitian ini diolah sedemikian rupa supaya terlihat secara lebih utuh dalam bentuk gambar, tabel, dan bentuk lainnya, hal tersebut memudahkan peneliti pemaparan dan penegasan kesimpulan penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpecah-pecah, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan (Hardani dkk, 2020).

Penyajian data dapat membantu penelitian ini dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Dengan teknik ini, dapat mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan. Pada penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi dan tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel (Hardani dkk, 2020).

Proses penarikan simpulan dalam penelitian ini dimulai dari melakukan peninjauan data primer dari hasil wawancara dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan partai politik baru dan teori strategi partai politik untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai tujuan penelitian ini yaitu pembentukan dan strategi partai politik baru menuju pemilu tahun 2024 mendatang. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dan didukung dengan data sekunder penelitian. Setelah dianalisis, proses selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi. Pengolahan data dimulai dengan pencatatan data mentah kemudian dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Data dianalisis lalu diperiksa keabsahannya kemudian dibuat sebuah kesimpulan.

3.8. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2016). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif. Agar hasil data dapat dipercaya, peneliti melakukan triangulasi, yaitu berusaha untuk meninjau kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain dengan menggunakan metode yang berlainan dan pada waktu yang berlainan. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan peninjauan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal

dari elemen yang berbeda. Selain itu peneliti melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang dikembangkan oleh Denzim ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik serta teori (Moleong & J, 2017: 331). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Trianggulasi sumber data untuk mengkaji keabsahan data, yaitu dengan cara membandingkan data yang diperoleh oleh peneliti dari dimensi waktu maupun sumber lain. Peneliti menggunakan berbagai sumber seperti Undang-undang tentang Pemilu dan Partai Politik, dokumen, arsip dan berita online. Selain itu, peneliti membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dari partai politik baru (Partai Gelora dan Partai Ummat) dengan data yang diperoleh melalui partai iduknya (PKS dan PAN).
2. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan dengan pembentukan partai politik baru dari pecahan partai induk dan strategi politik partai pendatang baru dalam meraup suara pemilih dalam pemilu tahun 2024 mendatang.

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.1.1. Pemilihan Umum Tahun 1955

Pemilihan umum 1955 merupakan peristiwa kedua terbesar setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sehingga dapat diperkirakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia antusias sekali menghadapi peristiwa bersejarah tersebut. Apalagi muncul berbagai tuntutan dan harapan dari rakyat agar pemilihan umum dapat mengatasi segala persoalan yang dihadapi bangsa pada saat itu, baik berupa

kemelut politik yang berkepanjangan, kemerosotan ekonomi maupun ancaman terhadap keamanan. Secara formal rencana pelaksanaan pemilihan umum baru mendekati kenyataan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan politik mengenai terbentuknya Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).

UU Pemilu selalu berpedoman kepada UUDS yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 dan memuat 146 pasal. Landasan hukum pemilu 1955 adalah Undang–Undang Pemilihan Umum No 27 Tahun 1948, Undang–Undang No 12 tahun 1949, dan Undang–Undang Pemilihan No 7 Tahun 1953.

Adapun peserta pemilihan umum 1955 dapat digolongkan berdasarkan ideologinya antara lain :

1. Partai politik yang beraliran nasionalis :

Partai politik peserta pemilihan umum 1955 yang beraliran nasionalis antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Gerakan Pembela Pancasila, Partai Rakyat Nasional, Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI), Partai Buruh, Partai Rakyat Indonesia, PRIM, Partai R. Soedjono Prawirosoedarso, Partai Indonesia Raya Wongsonegoro, Partai Indonesia Raya Hazairin, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (PERMAI), Partai Persatuan Daya.

2. Partai politik yang beraliran Islam :

Partai politik peserta pemilihan umum 1955 yang beraliran Islam antara lain Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Perti, AKUI, Partai Politik Tharikat Islam (PPTI).

3. Partai politik yang beraliran komunis :

Partai peserta pemilihan umum yang beraliran komunis antara lain Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ACOMA.

4. Partai politik yang beraliran sosialis:

Partai yang beraliran sosialis antara lain Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Murba, Partai Rakyat Desa dan Baperki.

5. Partai yang beraliran Kristen/Nasrani :

Partai peserta pemilihan umum yang beraliran Kristen/Nasrani antara lain Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik (Pabottingi, 1998).

Pemilihan umum 1955 menghasilkan 4 (empat) partai politik yang meraih kemenangan besar yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi) dan PKI (39 kursi). Munculnya NU dan PKI sebagai partai besar merupakan hal yang tidak terduga sebelumnya karena pada masa DPRS NU hanya memperoleh 8 kursi dan PKI 17 kursi. Adapun rincian peraih suara empat besar pemilihan umum 1955 adalah sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
2. Partai Masyumi
3. Partai Nahdlatul Ulama (NU)
4. Partai Komunis Indonesia (PKI).

4.1.2. Pemilihan Umum Tahun 1971

Pemilihan umum 1971 merupakan pemilihan umum yang dilaksanakan pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah gagalnya G 30 S/PKI tahun 1965 kehidupan politik Indonesia mengalami perubahan yang drastis dan prinsipil. Pertama berakhirnya kepemimpinan Presiden Soekarno dan runtuhnya sistem politik demokrasi terpimpin, kedua meningkatnya peranan ABRI dan yang ketiga adalah lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dengan sistem politik Demokrasi Pancasila.

Semenjak memegang kendali kekuasaan, pemerintah Orde Baru yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, bersifat anti komunis dan berorientasi kuat pada pembangunan mencoba untuk membangun sistem pemilihan umum

yang mampu memelihara stabilitas pemerintahan. Salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan Presiden Soeharto adalah menyelenggarakan pemilihan umum, hal ini telah diputuskan oleh MPRS dalam Ketetapan No. XI/MPRS/1966.

Pada tanggal 7 Februari 1970 Presiden Soeharto menyarankan pengelompokan partai-partai politik, yang mengemukakan bahwa partai-partai tersebut bertujuan untuk mempermudah kampanye pemilihan umum tidak untuk melenyapkan partai. Setiap partai memiliki identitasnya sendiri, pengelompokan partai tersebut antara lain adalah golongan nasionalis, golongan spiritual dan golongan karya. Terhadap gagasan ini maka IPKI dan PNI merupakan dua partai yang memberikan dukungan. Pada tanggal 9 Maret dibentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan atau Kelompok Material Spiritual yaitu kelompok partai yang menekankan pada pembangunan materiil tanpa mengabaikan aspek spiritual yang merupakan gabungan dari PNI, IPKI, MURBA, Parkindo dan Partai Katolik. Kelompok yang kedua adalah Kelompok Persatuan Pembangunan atau Kelompok Spiritual Materiil yaitu kelompok partai yang menekankan pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek materiil yang terdiri atas Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSII dan Perti (Soemardjan, 2000).

Golongan Karya berhasil mendapatkan 34.348.673 suara (62,80%), tidak terimbangi oleh partai politik lainnya baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dengan demikian Golongan Karya berhasil menguasai mayoritas suara di DPR, suatu hal yang belum pernah terjadi selama Indonesia berparlemen. Sebaliknya partai politik dengan berat hati terpaksa menerima predikat sebagai partai gurem. Dengan komposisi perimbangan kekuatan seperti itu apapun yang dikehendaki Golongan Karya di lembaga legislatif DPR dapat dijalankan dengan mudah, baik dalam membuat Undang-Undang maupun dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif. Yang

merupakan salah satu strategi politik mayoritas tunggal yang dikejar Golongan Karya sendiri dengan perspektif politiknya dengan berbagai cara telah berhasil didapat (Soemardjan, 2000).

4.1.3. Pemilihan Umum Tahun 1977

Pada tanggal 2 Mei 1977 diselenggarakan pemilihan umum yang ketiga dalam Sejarah Nasional Indonesia dan kedua kalinya diadakan berdasarkan UUD 1945 pada masa Orde Baru. Dalam pemilihan tersebut dari 70 juta rakyat Indonesia yang berhak memilih hanya 63.998.344 pemilih yang menggunakan haknya. Asas yang dipakai sama dengan pemilihan umum 1971 yaitu asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER). Berbeda dengan pemilihan umum 1971 yang diikuti oleh banyak partai, tetapi dalam pemilihan umum 1977 hanya diikuti oleh 3 peserta, dimana dua diantaranya adalah hasil fusi dari beberapa partai yaitu :

1. Partai Persatuan Pembangunan Partai Persatuan Pembangunan ini merupakan fusi dari partai-partai Islam seperti NU, PERTI, Parmusi dan PSSI.
2. Golongan Karya
3. Partai Demokrasi Indonesia Partai Demokrasi Indonesia merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Kristen dan IPKI (Sukarna 1990:34)

Pemilihan umum 1977 menghasilkan pemenang yaitu Golongan Karya dengan jumlah suara terbanyak 39.750.096 suara (62,11). Golongan Karya tetap sukses mempertahankan posisinya sebagai kekuatan mayoritas dan mulai menjadi predominan (Soemardjan, 2000).

4.1.4. Pemilihan Umum Tahun 1982

Pada tanggal 4 Mei 1982 pemilihan umum dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia dan seluruh Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dalam pemilihan umum ini tercatat pemilih yang memberikan suara sebanyak 75.126.306 dalam penyelenggaraan Pemilu ini diwarnai beberapa peristiwa selama masa kampanye yang menjurus ke arah kerusuhan, karena tidak terkendalinya masa pendukung salah satu organisasi peserta Pemilu. Mereka melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan mengacau kampanye organisasi peserta Pemilu yang lain. Peristiwa tersebut selanjutnya diselesaikan menurut hukum dan para pelakunya diadili serta dipidana setelah kesalahan mereka terbukti.

Pemilihan umum 1982 memilih 360 anggota dari seluruh jumlah anggota DPR yang ditetapkan sebesar 460 anggota. Sedangkan 100 anggota lainnya pengisiannya dilakukan melalui pengangkatan oleh Presiden. Namun begitu dalam pelaksanaannya anggota yang dipilih tersebut ditambah hingga menjadi 364 orang. Hal ini di sebabkan adanya penghitungan suara yang dimiliki oleh setiap organisasi peserta Pemilu yang dikumpulkan dari seluruh daerah pemilihan dan jumlahnya memungkinkan bertambahnya wakil mereka. Jumlah tambahan tersebut diambil dari jatah Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat sebanyak 25 orang.

Pemilihan umum ketiga masa Orde Baru diadakan dengan hasil Golongan Karya kembali sukses dalam mengumpulkan suara tunggal yaitu 48.334.724 suara (64,34 %), sedangkan PPP tetap kurang beruntung karena hanya dapat menarik sebanyak 20.871.880 suara (27,78 %) dan PDI yang kali ini hanya memperoleh suara 5.919.702 suara. Dibandingkan dengan pemilihan umum 1977 suara Golkar naik sebanyak 2,23 %, PPP yang pada Pemilu 1977 meningkat jumlah suaranya 2,17 % maka pada Pemilu 1982 menurun 1,51 %. Sedangkan PDI yang sudah turun 1,48 % maka pada Pemilu ini

berkurang lagi 0,72 %.

Ditinjau dari penguasaan kursi DPR maka Golongan Karya mendapatkan 246 kursi (53,47 %), maka jika ditambah 21 wakil Golkar non ABRI dan 75 wakil Golkar ABRI hasil pengangkatan jumlah kursi Golkar menjadi 342 kursi (74,35 %). Kursi yang diduduki PPP 94 buah (20,44 %) dan PDI menduduki 24 kursi (5,21 %) maka kursi partai politik berjumlah 118 buah (25,65 %). Dari pada pemilihan umum 1977 PPP dan PDI masing-masing kehilangan 5 kursi sedangkan Golkar bertambah 14 kursi. Dengan demikian tetap secara mutlak menyandang predikat sebagai kekuatan politik dengan mayoritas absolut yang menguasai suara, sekaligus memastikan diri sebagai partai dominan dalam arti sejak pemilihan umum 1971-1982 tetap menjadi kekuatan politik dengan mayoritas besar di DPR, sementara PPP dan PDI tetap dalam posisi minoritas (Soemardjan, 2000).

4.1.5. Pemilihan Umum Tahun 1987

Pemilu 1987 ditandai oleh jumlah perkembangan penting dalam upaya melanjutkan proses pembaharuan politik yang memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pertama mengangkat asas yang meliputi dasar, landasan, pedoman pokok, organisasi politik dan peserta pemilihan umum. Dengan diterapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik peserta Pemilu dan sebagai pelaksanaan ketetapan MPR No 11/MPR/1983 tentang GBHN dan No III/MPR/1983 tentang pemilihan umum yang ditindaklanjuti dengan UU No 1 tahun 1985 tentang perubahan atas UU No.15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1975 dan UU No. 2 tahun 1980 dan No. 3 tahun 1985 tentang perubahan atas UU No. 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golongan Karya, maka organisasi politik

peserta Pemilu hanya berasaskan Pancasila dalam menjabarkan program-program untuk mewujudkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dengan demikian tidak ada lagi masalah yang bersifat ideologis dalam program, tema dan materi kampanye.

Kedua mengenai tanda gambar sejalan dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas maka dilakukan penyempurnaan tanda gambar. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dalam Pemilu 1982 menggunakan tanda gambar Ka'bah dalam Pemilu 1987 memakai tanda gambar bintang ditengah segi lima. Demikian pula dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang sebelumnya menggunakan tanda gambar banteng dengan latar belakang beringin disertai padi dan kapas di bagian kiri dan kanan, kemudian menggunakan tanda gambar banteng, sedangkan Golongan Karya (Golkar) tetap menggunakan tanda gambar pohon beringin.

Pada tanggal 23 April 1987 pemungutan suara dilaksanakan dan tanggal 6 Juni 1987 Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam selaku Ketua Panitia Pemilihan Umum Indonesia, mengumumkan hasil tetap pemilihan umum. Jumlah pendaftar sebanyak 93.965.956 orang atau 57,68 % dari penduduk Indonesia yang berjumlah 162.921.989 orang. Dari jumlah pemilih terdaftar telah menggunakan hak pilihnya sebanyak 85.809.816 orang atau sekitar 91,23 %. Golongan Karya kembali mengulang kesuksesannya, suara rakyat pemilih yang dikumpulkan berjumlah 62.783.680 suara (73,17 %). (Soemardjan, 2000).

Pada pemilihan umum 1987 kursi DPR ditingkatkan dari 460 menjadi 500 dan pemberian kursi pada wakil non ABRI yang terakhir berjumlah 21 buah sekarang ditiadakan, tetapi kursi ABRI dinaikkan jumlahnya dari 75 menjadi 100. Dengan demikian Golongan Karya semakin membesar dan semakin meneguhkan dirinya sebagai partai dominan dan sebaliknya PPP dan PDI terus berada dalam posisi

minoritas kecil dan cenderung semakin mengecil.

4.1.6. Pemilihan Umum Tahun 1992

Pemilihan umum dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992 dan bertujuan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat periode 1992-1997. Meskipun tetap menguasai suara Golongan Karya turun dan meraih suara 66.599.343 suara (68,10 %) atau turun 5,04 % dari pemilihan umum 1987. Sementara PDI kembali meningkatkan perolehan suaranya dengan memperoleh 14.585.584 suara (14,29 %) atau naik 4,06 % dari Pemilu sebelumnya. Sedangkan PPP dapat pula memperbesar sedikit kekuatannya dengan merebut 16.624.577 suara (16,99 %) atau bertambah 1,02 %.

Ditinjau dari segi perolehan kursi Golongan Karya mendapat 282 kursi (56,40 %) ditambah 100 kursi ABRI sehingga Golongan Karya menguasai 382 kursi (76,40 %). Adapun partai politik hanya menduduki 118 kursi (23,60 %) yaitu PPP 62 kursi (12,40 %) dan PDI 56 kursi (11,20 %). Dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya Golkar turun 17 kursi sedangkan kursi PDI dan PPP masing-masing naik 16 dan turun 1 kursi. Dan Golongan Karya tetap bertahan sebagai single majority, sementara Parpol lainnya meskipun mendapat tambahan kursi belum memadai untuk ke posisi mayoritas (Soemardjan, 2000).

4.1.7. Pemilihan Umum Tahun 1997

Pada pemilihan umum 1997 suara Golongan Karya naik, begitu pula suara PPP tetapi suara PDI anjlok total. Kursi Golongan Karya naik menjadi 325 kursi (65 %), bersama kursi ABRI yang sekarang di turunkan menjadi 75, Golongan Karya dan ABRI menguasai 400 kursi (80 %) sedangkan Partai Politik hanya memegang 101 kursi (20 %) yang terbagi atas PDI 11 kursi (2 %) dan PPP 90 kursi (18 %).

Dibandingkan dengan pemilihan umum 1992 kursi Golongan Karya berjumlah sebanyak 43 kursi, PPP meningkat 28 kursi dan PDI merosot 45 kursi. Dengan demikian mayoritas tunggal Golongan Karya semakin menanjak sedangkan kekuatan partai politik kembali menurun. Kekuatan PPP dan PDI seperti halnya pemilihan umum 1987 yaitu menguasai sejumlah 101 kursi (PPP 61 kursi dan PDI 40 kursi) (Soemardjan, 2000).

4.1.8. Pemilihan Umum Tahun 1999

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah gelombang reformasi yang di pelopori mahasiswa. Golongan Karya sebagai pemegang mayoritas tunggalpun tidak mampu untuk menahannya. Dengan turunnya Presiden Soeharto dari kursi pemerintahan maka Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan posisi Soeharto sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Presiden B.J. Habibie membentuk pemerintahan reformasi dan menyatakan untuk mempercepat pemilihan umum yang seharusnya di laksanakan tahun 2003 di percepat menjadi tahun 1999.

Pemilihan umum 1999 merupakan kondisi paling penting dalam proses reformasi dan lewat pemilihan umum 1999 diharapkan dapat dijangkau aspirasi rakyat yang sebenarnya yang tidak terkontaminasi atau dimanipulasi seperti yang selama ini terjadi sekaligus membentuk pemerintahan yang diterima rakyat (akseptabel). Pemilihan umum 1999 dijadikan Pemilu pencerahan, melalui paket Undang-Undang bidang politik (No.2/1999, No. 3/1999 dan No. 4/1999) rakyat dijamin menikmati positive freedom. Selain adanya indikasi sangat kuat bahwa rezim Soeharto sebenarnya masih beroperasi di era reformasi.

Kampanye pemilihan umum yang diikuti oleh 48 partai sebagai peserta pemilihan umum digelar diseluruh wilayah Indonesia. Setelah

KPU berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 1999, serta berhasil menetapkan jumlah wakil-wakil Utusan Golongan dan Utusan Daerah maka MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan antara tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999, Sidang Umum ini mengukuhkan Amien Rais sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR.

Dalam Sidang Paripurna MPR XII tanggal 19 Oktober, pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh anggota MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstein dan 4 suara tidak sah. Dengan penolakan pertanggungjawaban tersebut maka peluang Habibie untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden RI menjadi tipis. Pada tahap pencalonan presiden berikutnya muncul tiga nama calon presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi di MPR, yaitu Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Yusril Ihza Mahendra, namun sebelum pemilihan Yusril mengundurkan diri. Dari hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting, Abdurahman Wahid mendapat 373 suara, Megawati 313 suara dan 5 suara abstain. Selanjutnya dilaksanakan pemilihan wakil presiden dengan calon Megawati dan Hamzah Haz yang akhirnya dimenangkan oleh Megawati.

4.1.9. Pemilihan Umum Tahun 2004

Pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum ke sembilan yang dilaksanakan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum yang demokratis. Adapun dasar dilaksanakannya pemilihan umum 2004 sendiri adalah UU RI No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Adapun partai politik yang menjadi peserta dalam pemilihan umum 2004 berjumlah 24 partai politik antara lain Partai Nasional Marhenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Patriot Pancasila, Partai Serikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor.

Hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2004 adalah bahwa Pemilu ini dimenangkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 4, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla, dengan memperoleh 69.266.350 suara (60,62%). Sedangkan pasangan nomor 2, Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi memperoleh 44.990.704 (39,38%) suara. Sesuai dengan selesainya penghitungan hasil Pemilu putaran II ini, final sudah hasil Pemilu presiden dan wakil presiden 2004.

4.1.10. Pemilihan Umum Tahun 2009

Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2009 atau Pileg 2009) diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD

Kabupaten/Kota) se- Indonesia periode 2009-2014. Peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009

- 1) Partai Hati Nurani Rakyat
- 2) Partai Karya Peduli Bangsa
- 3) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
- 4) Partai Peduli Rakyat Nasional
- 5) Partai Gerakan Indonesia Raya
- 6) Partai Barisan Nasional
- 7) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- 8) Partai Keadilan Sejahtera
- 9) Partai Amanat Nasional
- 10) Partai Perjuangan Indonesia Baru
- 11) Partai Kedaulatan
- 12) Partai Persatuan Daerah
- 13) Partai Kebangkitan Bangsa
- 14) Partai Pemuda Indonesia
- 15) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
- 16) Partai Demokrasi Pembaruan
- 17) Partai Karya Perjuangan
- 18) Partai Matahari Bangsa
- 19) Partai Penegak Demokrasi Indonesia
- 20) Partai Demokrasi Kebangsaan
- 21) Partai Republika Nusantara
- 22) Partai Pelopor
- 23) Partai Golongan Karya
- 24) Partai Persatuan Pembangunan
- 25) Partai Damai Sejahtera
- 26) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.
- 27) Partai Bulan Bintang
- 28) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- 29) Partai Bintang Reformasi .
- 30) Partai Patriot

- 31) Partai Demokrat
- 32) Partai Kasih Demokrasi Indonesia
- 33) Partai Indonesia Sejahtera.
- 34) Partai Kebangkitan Nasional Ulama
- 35) Partai Merdeka
- 36) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
- 37) Partai Sarikat Indonesia
- 38) Partai Buruh

Sedangkan Peserta Pemilu Presiden dan wakil Presiden 2009. Pertama, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, didukung oleh PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI. Kedua, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI. Ketiga, Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto, didukung oleh Partai Golkar, Partai Hanura. Yang menjadi pemenang Pilpres 2009 adalah pasangan SBY-Boediono dengan 73.874.562 suara.

4.1.11. Pemilihan Umum Tahun 2014

Pemilu 2014 diselenggarakan dua kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 dengan tujuan pemilihan para anggota legislatif. Pemilu legislatif ini bertujuan memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota Se-Indonesia untuke periode 2014-2019. Pemilu kedua dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014 dengan tujuan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (KPU RI, 2022).

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serentak di seluruh Indonesia periode 2014-2019. Khusus untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota DPD (KPU RI, 2022)..

- 1) Partai NasDem
- 2) Partai Kebangkitan Bangsa
- 3) Partai Keadilan Sejahtera
- 4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 5) Partai Golongan Karya
- 6) Partai Gerakan Indonesia Raya
- 7) Partai Demokrat
- 8) Partai Amanat Nasional
- 9) Partai Persatuan Pembangunan
- 10) Partai Hati Nurani Rakyat
- 11) Partai Bulan Bintang
- 12) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (KPU RI, 2022).

Pemilihan presiden dan wakil presiden ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (KPU RI, 2022).

4.1.12. Pemilihan Umum Tahun 2019

Indonesia akan kembali menyelenggarakan Pemilihan Umum di tahun 2019. Pada Pemilu 2019 ada 16 partai politik nasional yang akan berpartisipasi. Keenam belas partai politik nasional tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN); Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Partai Demokrat; Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); Partai Golongan Karya (Golkar); Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Partai Nasional Demokrat (Nasdem); Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Persatuan Indonesia (Perindo); Partai Solidaritas Indonesia (PSI); Partai Beringin Karya (Berkarya); Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda); dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); ditambah 4 partai politik lokal Aceh yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nanggroe Aceh.

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi *test case* penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Pemilu serentak tahun 2019 telah dilaksanakan. Pada pemilu kali ini menggabungkan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden.

Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi

dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019. Pilpres 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum (Pemilu) serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

PEMILU 2019



Gambar 4.3. Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019. Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional. Partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah



Gambar 4.4. Partai Politik Pada Pemilu 2019

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022)

Hasil Pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 9 partai yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Sebagaimana bunyi UU Pemilu, partai politik setidaknya harus mengantongi suara 4 persen dari pemilu untuk dapat melenggang ke Parlemen. Mereka yang suaranya tidak mencapai 4 persen dinyatakan tak memenuhi ambang batas. Artinya, partai tersebut gagal menempatkan kadernya di DPR RI. Berikut hasil Pemilu Legislatif 2019 diurutkan dari partai yang mendapat suara tertinggi. PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN. Kemudian Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 (Paslon 01), Joko Widodo dan Ma'ruf Amien, sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019-2024.

4.1.13. Pemilihan Umum Tahun 2024

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2024–2029 yang akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Pemilihan ini akan menjadi pemilihan presiden langsung kelima di Indonesia.

Dikeluarkannya revisi UU Pemilu dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2021 menyiratkan dihentikan pembahasan revisi. Dengan demikian, wacana normalisasi jadwal pilkada di 2022 dan 2023 sudah pupus. Pada tahun 2024 mendatang akan digelar Pemilihan Presiden, Anggota DPD, dan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten berbarengan dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati / Walikota.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu dalam:

- 1) Pasal 167 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU".
- 2) Pasal 167 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional".
- 3) Pasal 167 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara".
- 4) Pasal 167 ayat (7) yang menyatakan bahwa, "Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden".

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) yang menyatakan bahwa, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Pada saat RDP yang dihadiri Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, disimulasikan penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 atau 6 Maret 2024. Sedangkan pemilihan kepala daerah serentak disimulasikan digelar pada 13 November 2024 (Wiyoko, 2021).

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024, tahapan pemilu akan dimulai pada 14 Juni 2022. Tahapan dimulai dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Berikut tahapan Pemilu 2024:

1. Pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022.
2. Penetapan peserta Pemilu pada 14 Desember 2022.
3. Pencalonan anggota DPD pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023.
4. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada 24 April 2023-25 November 2023.
5. Pencalonan presiden dan wakil presiden pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
6. Kampanye selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
7. Pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

Berdasarkan Lampiran satu Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 384 tahun 2022, KPU pada 14 Oktober menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada pimpinan partai politik dan juga Bawaslu. Terdapat 18 parpol yang lolos verifikasi administrasi, berikut parpol yang dinyatakan lolos verifikasi:

1. PPP.
2. PKB.
3. PDI Perjuangan.
4. Partai Nasdem.
5. Partai Demokrat.
6. PAN.
7. Partai Gerindra.
8. PSI.
9. Partai Golkar.
10. Perindo.
11. PKN.
12. PKS.
13. Partai Gelora Indonesia.
14. PBB.
15. Partai Hanura.
16. Partai Ummat.
17. Partai Buruh.
18. Partai Garuda.

Sedangkan partai yang tidak lolos adalah:

1. Partai Prima.
2. PKP Indonesia (PKPI).
3. Parsindo.
4. Partai Republik.
5. Partai Republikku Indonesia.
6. Partai Republik Satu.

Pada tanggal 14 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh menjadi peserta Pemilu 2024. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 518 Tahun 2022.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024. Partai besutan Amien Rais itu dinyatakan sah sebagai peserta pemilu usai berhasil memenuhi syarat keanggotaan dalam proses verifikasi faktual ulang di dua provinsi. Partai Ummat dapat nomor urut paling akhir karena nomor urut lainnya sudah dimiliki partai politik lain yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. Berikut daftar partai politik yang ditetapkan menjadi peserta pemilu sesuai nomor urutnya:

Tabel 4.6. Nomor Urut Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2024

Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-P)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (Pks)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (Pkn)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12	Partai Amanat Nasional (Pan)
13	Partai Bulan Bintang (Pbb)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (Psi)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (Ppp)
18	Partai Generasi Atjeh Beusaboh
19	Thaat Dan Taqwa (Gabthat)
20	Partai Darul Aceh (Pda)
21	Partai Aceh (Pa)

22	Partai Adil Sejahtera (Pas) Aceh
23	Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Sira
24	Partai Ummat

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023) dalam kpu.go.id

4.2. Gambaran Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

4.2.1. Sejarah Partai Gelora

Pada tahun 2014, Anis Matta mengawali buku *Gelombang Ketiga Indonesia* dengan kisah pribadinya, yaitu makan nasi kecap, sampai kepada peradaban. Menurutnya, terdapat segitiga ketegangan peradaban: Islam, Kemodernan, dan Ke-Indonesia-an. Namun, ketegangan segitiga tersebut akan segera berakhir, karena Indonesia akan segera memasuki era sejarah baru yang disebut *Gelombang Ketiga Indonesia*. Akan ada titik temu antara Islam, kemodernan, dan ke-Indonesiaan. Akan ada titik temu antara agama, pengetahuan, dan kesejahteraan.

Pada Januari 2018, Anis Matta memaparkan gagasan Arah Baru Indonesia (ABI) pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) KAKAMMI 2018 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Ahad, 4 Januari 2018. Selanjutnya pada September 2018, Ormas Garbi berbadan hukum di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada September 2018. GARBI lahir atas respon daerah-daerah tentang gagasan Arah Baru Indonesia oleh Anis Matta. Diskusi santai dari kedai kopi ke kedai kopi lainnya sampai mengkristal menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan 5 Besar Dunia Dan GARBI Daerah diresmikan Fahri Hamzah dan Mahfuz Sidik.

Tanggal 28 Oktober 2019, Piagam Pendirian Partai Gelombang Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2019 oleh 99 orang dari 34 provinsi, 1.020 pendiri di tingkat daerah sesuai dengan amanat UU. Selanjutnya pada 10 November 2019, Deklarasi Pendirian Partai Gelora, pelantikan

Pengurus Pusat: Majelis Permusyawaratan Nasional, Mahkamah Partai, dan Dewan Pimpinan Nasional. Di tanggal 11 November 2019 Pendaftaran Akta Notaris Partai Gelora, dan 12 November 2019 merupakan permulaan pembentukan struktur Partai Gelora Indonesia dan perlengkapan persyaratan administratif untuk pendaftaran sampai tanggal 12 Maret 2020.

Tanggal 31 Maret 2020 Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora telah mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Mereka cetak sejarah sebagai partai pertama yang melakukan pendaftaran secara virtual. Pendaftaran virtual diterima langsung Menhkumham Republik Indonesia, yaitu Yasona Laoly, didampingi Dirjen Adminstrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahardian.

Pada 19 Mei 2020 Surat Keputusan (SK) Menkumham ditandatangani oleh Yasona Laoly, bertepatan dengan bulan puasa Ramadan tanggal 26 Ramadan 1441 Hijrah di masa pandemik Covid-19. 2 Juni 2020, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah menerima secara fisik 3 (tiga) Surat Keputusan (SK) Menkumham terkait Pengesahan Badan Hukum Partai Gelora yang telah dilakukan penyerahan secara virtual pada Selasa, 2 Juni 2020. SK tersebut diserahkan secara langsung oleh Dirjen AHU Cahyo Muzhar Rahardian dan didampingi Direktur Tata Negara Baroto.

4.2.2. Lambang dan Makna Partai

1. Lambang Partai Gelora

- 1) Warna dasar lambang Partai adalah biru tosca (*turkish blue*) dengan lingkaran berwarna putih mengelilingi gambar gelombang berwarna biru gelap (*donker*), yang di atasnya terdapat warna merah dan putih serta dibawahnya terdapat tulisan GELORA INDONESIA berwarna putih;
- 2) Tulisan Gelora Indonesia berwarna putih dengan bentuk huruf

(font) nya adalah *Gotham Black*.



Gambar 4.5. Logo Partai Gelora
Sumber: Gelora.co.id

2. Makna warna lambang Partai Gelora :

- 1) Warna biru navy melambangkan gelombang laut kekuatan besar yang tercipta dari berbagai gerakan dan momentum, juga melambangkan gerak besar sejarah yang mengubah kehidupan umat manusia;
- 2) Warna biru turkish melambangkan rakyat adalah pelaku utama sejarah yang berhak dan berkewajiban menentukan masa depan dan jalan sejarahnya sendiri;
- 3) Warna merah putih melambangkan Indonesia, bangsa dan negara tempat Partai ini mengabdikan:
- 4) Simbol lingkaran melambangkan bumi yang bulat adalah Cita - cita Partai untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dan bagian dari kepemimpinan dunia;
- 5) Simbol kotak biru turkish melambangkan langit yang cerah secerah masa depan Indonesia bersama Partai Gelora Indonesia.

4.2.3. Asas dan Jati diri Partai Gelora

Partai gelora mengusung Asas Partai adalah Pancasila dengan Jatidiri Partai adalah Islam, nasionalis, demokrasi, kemanusiaan dan kesejahteraan.

- a. Islam sebagaimana yang dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah nilai-nilai keislaman dalam perspektif kehidupan berbangsa, bernegara yang didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai energi yang menyatukan tanah air dan rakyatnya, dengan menjunjung tinggi norma, etika, serta kemanusiaan, dan penghormatan terhadap segenap agama yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Nasionalisme sebagaimana yang dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah rasa cinta, setia dan semangat pembelaan terhadap tanah air, bangsa dan negara Indonesia maupun penghormatan kepada segenap Warga negara dengan kemajemukannya, untuk menjaga dan memajukan peradaban bangsa, tanpa membedakan suku, agama, ras, serta golongan.
- c. Demokrasi sebagaimana yang dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah semangat untuk membangun pemerintahan dan peradaban Indonesia dengan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dan nilai-nilai kebebasan, persamaan, keterbukaan, tanggung jawab serta penghargaan terhadap kebhinekaan.
- d. Kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah semangat untuk meletakkan manusia dan sifat kemanusiaannya pada tempat yang mulia dan menjadi pijakan pelebagaan sikap partai dalam perumusan kebijakan negara.
- e. Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah semangat untuk mengelola bumi, air dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalam negara Indonesia untuk digunakan sebesar-besarnya meningkatkan kemakmuran dan standar kualitas hidup rakyat, dengan mendorong etos kerja, menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan dan kedermawanan menuju Indonesia yang makmur dan berdaulat.

4.2.4. Visi dan Misi Partai Gelora

Visi Partai ialah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia.

Misi Partai adalah:

- 1) Membangun masyarakat yang religious dan berpengetahuan
- 2) Membangun pemerintahan efektif.
- 3) Mengembangkan kekuatan pertahanan nasional.
- 4) Menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan inovasi sains dan teknologi.
- 5) Menumbuhkan dan pemeratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
- 6) Mendorong pembangunan yang menopang kelestarian lingkungan. Berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan internasional.

4.2.5. Tujuan dan Fungsi Partai Gelora

Tujuan Partai Gelora adalah:

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 5) Meningkatkan partisipasi politik anggota, relawan dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- 6) Memperjuangkan cita-cita partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai Gelora berfungsi sebagai sarana:

- 1) Pendidikan politik bagi anggota, relawan dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- 4) Partisipasi politik Warga Negara Indonesia.
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

4.2.6. Kepengurusan Partai Gelora

Tabel 4.7. Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora periode 2019-2024

No	Kepengurusan	Pengurus
1	Ketua Umum	M. Anis Matta
2	Wakil Ketua Umum	Fahri Hamzah
3	Sekretaris Jendral	Mahfuz Sidik
4	Bendahara Umum	Achmad Eilyadi
5	Kepala Staf Ketua Umum	Riko Desendra
6	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Administrasi:	Budi Hermawan
7	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Data	Ahmad Chudori
8	Wakil Sekretaris Jenderal Bid. Hukum & Regulasi	Handoyo Prihatanto
9	Wakil Sekretaris Jenderal Bid. Monitoring & Evaluasi	Dewi Mustikaningsih
10	Wakil Sekretaris Jenderal Bid. Hubungan Masyarakat	Muhammad Taslim
11	Wakil Sekretaris Jenderal Bid. Koordinasi Kewilayahan	Junef Ismaliyanto
12	Wakil Sekretaris Jenderal Bid. Hubungan Antar Lembaga	Sahidah Silalahi
13	Wakil Sekretaris Jenderal Bid. Arsip dan Sejarah	Dwi Tribudi

14	Wakil Sekretaris Jenderal Bid. Kerumahtanggaan	Nugraha
15	Wakil Bendahara Umum	Fetty Fatmasari Utami
16	Bidang Pengembangan Wilayah - I:	Mohammad Syahfan Badri
17	Bidang Pengembangan Wilayah - II	Achmad Zairofi
18	Ketua Bidang Pengembangan Wilayah - III	Ahmad Zainuddin
19	Bidang Pengembangan Wilayah - IV	Rofi' Munawar
20	Bidang Pengembangan Wilayah - V	Akhmad Faradis
21	Bidang Kaderisasi	
	Ketua	Musyafa Ahmad Rahim
	Wakil Ketua	Gunawan
	Sekretaris	Muhith M Ishag
22	Bidang Rekrutmen Anggota	
	Ketua	Endy Junaedy K
	Wakil Ketua	Muhammad Ilyas
23	Bidang Pendidikan Pengembangan Kepemimpinan	
	Ketua	Hamy Wahjunianto
	Sekretaris	Lenny Hamdi
24	Bidang Hubungan Keumatan	
	Ketua	Raihan Iskandar
	Sekretaris	Ade Kurniawan
25	Bidang Syi'ar & Dakwah	
	Ketua	Abdur Rahim
	Sekretaris	Amien Rais
26	Bidang Seni & Budaya	
	Ketua	Deddy Mizwar
	Wakil Ketua	Ahmad Yani
27	Bidang Generasi Muda	
	Ketua	Hudzaifah Muhibullah
	Wakil Ketua	Hamzah Izzulhaq
	Sekretaris	Mushab Abdurohman
28	Bidang Kerjasama dan Jaringan Lembaga	
	Ketua	Ratu Ratna Damayani
	Sekretaris	Muhammad Fauzi
29	Bidang Pelayanan Sosial	
	Ketua	Setyandari
	Sekretaris	Lina Kadarmini
30	Bidang Perempuan	
	Ketua	Ratieh Sanggarwaty
	Sekretaris	Ina Saleha
31	Bidang UMKM & Ekonomi & Keluarga	
	Ketua	Srie Wulandari
	Sekretaris	Yanuar Taslim
32	Bidang Komunikasi	
	Ketua	Herman Ari Saptono
	Sekretaris	Zainul Muhtadien
33	Bidang Hubungan Internasional	
	Ketua	Hanwira Halim
	Sekretaris	Bunga

34	Bidang Kebijakan Publik	
	Ketua	Achmad Nur Hidayat
	Sekretaris	Febby R Widjayanto
35	Bidang Pengembangan Narasi & Literasi	
	Ketua	Dadi Krismatono
	Sekretaris	Elvandi
36	Bidang Pemenangan Pemilu	
	Ketua	Rico Marbun
	Wakil Ketua	Ananto Pratikno
	Sekretaris	Mardiah
37	Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia & Advokasi	
	Ketua	Amien Fahrudin

Sumber: Buku Saku Partai Gelora

**Tabel 4.8. Struktur Pengurus DPW Partai Gelora Lampung
Periode 2019-2024**

No	Kepengurusan	Nama Pengurus
1	Ketua Umum	Samsani Sudradjat
2	Wakil Ketua Bidang SDM	Agung Bagus Prahara Putra
3	Wakil Ketua Bidang Kewanitaan, Pemberdayaan Perempuan dan UMKM	Fajar Andriyani
	Sekretaris	M. Imron Rosadi
5	Wakil Sekretaris	Sofwan Zulfikar
6	Bendahara Umum	R. Sulistiyo Purnomo Pambudi
7	Bidang Teritori	
	Ketua	Zaeni Hamdan
	Anggota	Hery Mustofa
8	Bidang SDM	Imam Mahfudi
9	Bidang Perempuan	
	Ketua	Ferawati
	Anggota	Siska Rati, Titin Kurniawati, Liza Fitriani, Elvina Reviani
10	Bidang Ekonomi dan UMKM	
	Ketua	Sudarsih
	Anggota	Asih, Eka Setiawati, Pipit Senja Oktavia, Yulinda Trianda Dewi, Novi Indriani
11	Bidang Hukum dan Advokasi	
	Ketua	Resmen Kadafi
	Anggota	Kory Kurniawan
12	BAPPILU	
	Ketua	Asis Budi Santoso
	Anggota	Andry Kurniawan
13	Bidang Humas	
	Ketua	Arif Gangsal Wicaksono
	Anggota	Reyhan Adityo Purnomo
14	Bidang Generasi Muda	

Ketua	Syahrul Fatah
Anggota	Agung Ilham Bahari, Trio Bagus, Septya Wulandari
15	Bidang Seni dan Budaya
Ketua	Vitho Yerriandha
Anggota	Rizki Okto Danela, Fahriansyah Hilman, Chandra Satria, M. Renaldi Febriyansyah
Bidang Kemaritiman	Dedi Kurniawan Syahputra
Bidang Pelayanan Sosial	Dedy Susanto
Bidang Hubungan dan Jaringan Lembaga	
Ketua	Dedek Andrianto
Anggota	Junaidi, Hendra Gunawan, Lastri

Sumber: Buku Saku Partai Gelora

4.3. Gambaran Umum Partai Ummat

Partai Ummat adalah Partai yang berasaskan Islam Rahmatan Lil ‘AlAmien. Maksud asas Rahmatan Lil ‘AlAmien adalah nilai- nilai Islam sebagai rahmat bagi semua; dengan menegakkan keadilan, mewujudkan kemaslahatan alam semesta dan kemanusiaan universal, serta menjauhkan segala mafsadat (kerusakan) dan kezaliman. Partai Ummat adalah partai kader yang bersifat terbuka dan mandiri, yang berdasarkan nilai-inilai Al Qur’an dan Sunnah. Partai Ummat konsisten dalam menjalankan nilai Al Amru bil Adli wan Nahyu ‘Anil Dhulmi (menegakkan Keadilan dan memberantas Kezaliman). Motto (Semboyan) Partai Ummat adalah “Lawan Kezaliman,Tegakkan Keadilan”.

Partai Ummat didirikan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 dan dideklarasikan di Yogyakarta pada hari Kamis pada tanggal 29 April 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 H. Partai Ummat didirikan oleh Prof. Dr. H. Mohammad Amien Rais bersama 92 orang para pendiri lainnya, antara lain Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom, M.Sc., Dr. H. Malem Sambat Kaban, SE, M.Sc (H. M.S. Kaban), H. Ansufri Idrus Sambo (Ustadz Sambo), Hj. Titi Widoretno Warisman (Hj. Neno Warisman), Ahmad Buchory Muslim (UBM), Buni Yani, Ahmad Hanafi Rais, SIP, MPP., dan lain-lain.

Kitab Suci Al-Qur'an mendorong umat beriman agar dalam mengarungi kehidupan di dunia, mereka senantiasa melaksanakan dua perintah Allah SWT secara serentak. Pertama melakukan Al-Amru bi Al-Ma'ruf dan Al-Nahyu 'an Al-Munkar, yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan. Kedua menjalankan Al-Amru bi Al-'Adli dan Al-Nahyu 'an Al-Dhulmi, yakni menegakkan Keadilan dan memberantas Kezaliman. Bila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familial dan komunal, maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan.

Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal, tetapi sebaliknya pula, hanya negara yang dapat menegakkan keadilan secara merata. Dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap serta kekuasaan yang paling besar, negara dapat melancarkan kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan. Namun hanya negara pula yang dapat menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya. Semua tergantung pada pemerintah yang sedang berkuasa, apakah sedang membela kepentingan rakyat, atau sebaliknya sedang membela kepentingan konglomerat dan korporatokrat. Melalui Partai Ummat insya Allah kita akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Melalui Partai Ummat kita akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal.

4.3.1. Lambang dan Makna Partai Ummat

Tanda gambar sekaligus lambang Partai Ummat adalah gambar berbentuk perisai hitam bergaris luar emas, bergambar bintang berwarna emas dan kuning di tengahnya, dengan tulisan PARTAI UMMAT di bawahnya dengan jenis huruf Arial Black dengan tulisan warna hitam.



Gambar 4.6. Logo Partai Ummat
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022)

Filosofi dan makna lambang:

- 1) Perisai hitam bergaris luar emas menyimbolkan Perisai Tauhid yang merupakan pancaran autentik dari kalimah syahadah, kalimah thayyibah, serta kalimah pembebasan.
- 2) Bintang yang tergambar pada Perisai Tauhid tersebut merupakan bintang yang ada pada dada Burung Garuda yang menyimbolkan sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3) Tauhid atau Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana disimbolkan oleh Perisai Tauhid dimaknai sebagai perlindungan holistik yang menjAmien ketersambungan kehidupan manusia dan sang Khaliq, sekaligus menjaga tegaknya mizan kehidupan manusia dalam suasana penuh keadilan, dan jauh dari kezaliman sesama.

4.3.2. Visi dan Misi Partai Ummat

Visi Partai Ummat adalah terwujudnya Indonesia sebagai negeri Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur dengan menegakkan nilai-nilai Ilahiah, Ukhuwah (Persaudaraan Ummat), Hurriyah (Kebebasan), Musawah (Kesamaan) dan ‘Adalah (Keadilan) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi Partai Ummat yaitu:

- a. Mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik
- b. Indonesia di atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa;

- c. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang dirahmati Allah yang memegang teguh nilai-nilai Ilahiah dengan tetap menjaga nilai luhur budaya bangsa serta mengembangkan semangat perdamaian, toleransi, saling menghormati dan bekerja sama;
- d. Mewujudkan kekuasaan pemerintahan yang adil, amanah dan bertanggung jawab secara konstitusional melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia;
- e. Mewujudkan pemerintahan yang amanah, kuat dan berwibawa; bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegakkan transparansi, akuntabilitas, maslahat umum, dan sistem meritokrasi;
- f. Mewujudkan sistem ekonomi Indonesia yang makmur dan berkeadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. Mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan air;
- h. Menegakkan hukum yang adil tanpa diskriminasi melalui aparat
 - i. dan institusi hukum yang bersih, mandiri, dan profesional;
- j. Mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab yang dilandasi oleh hukum dan etika moral sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, objektif, transparan dan bertanggung jawab;
- k. Mewujudkan kualitas pendidikan yang holistik, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia, khususnya generasi muda milenial yang memiliki kesadaran Ilahiah, berakhlak mulia, profesional, dan memiliki jiwa nasionalisme Indonesia;
- l. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan melalui perlindungan, pemberdayaan, dan optimalisasi perannya untuk kemaslahatan ummat;
- m. Memperjuangkan kemudahan berusaha, pemberdayaan ekonomi ummat, perlindungan, peningkatan kesejahteraan dan jAmienan bagi pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi;
- n. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan jAmienan atas

- hak-hak tenaga kerja, petani, dan nelayan;
- o. Menciptakan tatanan kehidupan sosial yang saling menghormati serta mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang unggul serta mengedepankan kearifan lokal sebagai kekayaan budaya nasional; dan
 - p. Meningkatkan perlindungan dan jaminan atas pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.3.3. Tujuan dan Fungsi Partai Ummat

Partai Ummat memiliki tujuan:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga, memelihara, dan menjadi pemersatu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- c. Menjadi alat perjuangan untuk mencegah kezaliman dan menegakkan keadilan serta kedaulatan rakyat demi terwujudnya Indonesia sebagai negeri Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur (negeri yang sejahtera dalam limpahan barokah Allah SWT);
- d. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, menyerap, merumuskan dan memperjuangkan kemaslahatan dan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara;
- e. Melakukan pendidikan politik kepada rakyat agar memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Melakukan rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi berdasarkan integritas, kapabilitas, kesetaraan dan keadilan gender; dan
- g. Membangun komunikasi politik berlandaskan akhlak dan etika politik, serta memperluas partisipasi politik warga Negara.

Partai Ummat memiliki fungsi:

- a. Sebagai sarana pendidikan politik dengan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan partisipasi politik anggota dan simpatisan dalam kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Sebagai sarana komunikasi politik dengan menghimpun aspirasi, artikulasi, dan agregasi kepentingan ummat dalam penyelenggaraan negara;
- c. Sebagai sarana sosialisasi politik dan alat perjuangan dakwah sesuai visi, misi, dan tujuan Partai Ummat.

4.3.4. Susunan Organisasi Partai Ummat

Struktur Organisasi Kepemimpinan Partai Ummat adalah:

1. Dewan Pimpinan Pusat di tingkat Nasional. Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas:
 - a. Majelis Syura, merupakan Lembaga Tertinggi dalam struktur kepemimpinan partai yang memiliki fungsi sebagai Majelis Permusyawaratan Tertinggi Partai yang dibentuk di tingkat pusat.
 - b. Majelis Pengawas Partai Pusat, merupakan lembaga partai yang berfungsi sebagai pengawas yang dibentuk di tingkat Pusat.
 - c. Majelis Etik, merupakan lembaga partai yang bertugas dalam pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi, dan/atau menyelesaikan permasalahan etik internal partai yang dibentuk di tingkat Pusat.
 - d. Mahkamah Partai, merupakan lembaga partai yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran terhadap AD/ART dan Peraturan Partai, serta perselisihan internal Partai yang dibentuk di tingkat Pusat.
 - e. Dewan Pengurus Pusat, merupakan pimpinan eksekutif tertinggi

- partai.
2. Dewan Pimpinan Wilayah, yaitu struktur kepemimpinan partai di tingkat Provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Majelis Pengawas Partai Wilayah (MPPW), yang merupakan lembaga partai yang dibentuk di tingkat Wilayah yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap Dewan Pengurus Wilayah.
 - b. Dewan Pengurus Wilayah (DPW), yang merupakan pimpinan eksekutif partai di tingkat Provinsi.
 3. Dewan Pimpinan Daerah, yaitu struktur kepemimpinan partai di tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 - a. Majelis Pengawas Partai Daerah (MPPD), yang merupakan lembaga partai yang dibentuk di tingkat Daerah yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap Dewan Pengurus Daerah.
 - b. Dewan Pengurus Daerah (DPD), yang merupakan pimpinan eksekutif partai di tingkat Kabupaten/Kota.
 4. Dewan Pimpinan Cabang, yaitu struktur kepemimpinan partai di tingkat Kecamatan, yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan dapat dibentuk Majelis Pengawas Partai Cabang (MPPC).

Tabel 4.9. Struktur Pengurus DPW Partai Ummat Lampung Periode 2019-2024

No	Kepengurusan	Pengurus
Majelis Pengawas Partai (MPP)		
1	Ketua	Hadiyono
2	Sekretaris	Syaifullah
3	Anggota	Umran
4	Anggota	Thony Syahril
Pengurus Harian		
1	Ketua	Abdullah Fadri Auli
2	Wakil Ketua	Eko Agung Saputra
3	Wakil Ketua	Saad Sobari
4	Wakil Ketua	Abd. Hamid Shoheh
5	Wakil Ketua	Harniwati
6	Wakil Ketua	Weki Harianto
7	Wakil Ketua	Fardarita

8	Wakil Ketua	Ben Bella
9	Wakil Ketua	Piter Gunawan
10	Wakil Ketua	Abdul Syukur
11	Sekretaris	Ahmad Bastari
12	Wakil Sekretaris	ahmad Aryadi
13	Wakil Sekretaris	Faisal Husni
14	Wakil Sekretaris	Farida Anggaraini
15	Wakil Sekretaris	Ferry Yanti
16	Wakil Sekretaris	Elvi Susanti
17	Wakil Sekretaris	Dhimas Ariwibowo
18	Wakil Sekretaris	Safwan Alie
19	Bendahara	Triadi Kurniawan
20	Wakil Bendahara	Saras Idfiana
21	Wakil Bendahara	Masayu Citra Tri Aryani
22	Wakil Bendahara	Uryani

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

4.4. Fusi, Konflik dan Perpecahan Partai Politik Di Indonesia

Fusi partai politik atau penyederhanaan (penggabungan) partai tahun 1973 merupakan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto. Tujuan fusi partai politik atau fusi parpol sendiri adalah untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan fusi parpol dianggap sebagai syarat utama untuk mencapai pembangunan ekonomi Indonesia.

Diberlakukannya kebijakan fusi parpol didasari oleh tidak stabilnya politik pada masa Orde Baru yang disebabkan oleh sistem kepartaian. Selain itu, diketahui juga bahwa partai politik pada era Orde Baru sangatlah banyak, sehingga memunculkan banya ideologi sekaligus kepentingan partai. Pemilihan umum tahun 1955 telah melahirkan sampai 29 partai yang masih ditambah dari perorangan atau independen. Oleh sebab itu, pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno melakukan Fusi Parpol berdasarkan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960. Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 mengatur tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai politik. Pada tanggal 14 Mei 1960, diumumkan bahwa hanya ada 10 partai politik yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Sejak saat itu, kebijakan Fusi Parpol terus berlangsung sampai Presiden Soekarno melepas jabatannya dan digantikan

oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan Fusi Partai Politik atau penggabungan partai politik tahun 1973 pada era Orde Baru (Adryamarthanino, 2021).

Pemilu 1977 merupakan ajang pemilihan umum kedua rezim Orde Baru setelah sebelumnya dilakukan pada 1971 yang dimenangkan telak oleh Golkar dan memantapkan posisi Soeharto sebagai presiden. Ada catatan sejarah penting dalam penyelenggaraan “pesta demokrasi” ini, yakni peleburan atau fusi partai politik (parpol) peserta pemilu. Terdapat 9 parpol ditambah 1 organisasi masyarakat (ormas), yakni Golkar, yang menjadi kontestan dalam Pemilu 1971. Dua tahun berselang, pada 1973, MPR mengeluarkan ketetapan tentang GBHN yang menegaskan mengenai perlunya pengelompokan organisasi peserta pemilu. Artinya, parpol-parpol yang dianggap “sejenis” akan difusikan.

Kelompok pertama melakukan fusi adalah partai-partai politik berideologi Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam PERTI. Dikutip dari buku Strategi PPP 1973-1982 karya Umaid Radi, keempat partai Islam ini melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhitung sejak 5 Januari 1973. Djarnawi Hadikusumo, Ketua Parmusi, mengatakan, penggabungan partai-partai politik berideologi Islam menjadi PPP ini tidak menemui kendala berarti karena sesuai dengan rencana yang dicanangkan pada Kongres Umat Islam 1969. Lima hari berselang, tanggal 10 Januari 1973, giliran kelompok nasionalis, plus dua partai agama non-Islam, yang meleburkan diri, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) serta Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Hasil fusinya menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Di tengah-tengah dua kubu itu, Golkar, pendatang baru yang langsung memenangkan Pemilu 1971 dengan telak, tetap berstatus sebagai organisasi masyarakat, dan inilah kendaraan politik Orde Baru yang amat dibutuhkan Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan.

Di Balik Siasat Fusi Gagasan fusi sebenarnya sudah pernah tertuang dalam pidato Presiden Soeharto dalam Kongres XII PNI tanggal 11 April 1970 di Semarang. Sebelum itu, wacana penyederhanaan partai-partai politik sudah tertuang dalam Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966. Manuel Kaisiepo mengungkapkan, gagasan penyederhanaan partai atau fusi partai awalnya diterima dengan baik oleh partai-partai Islam dan partai-partai berhaluan nasionalis. Gagasan tersebut sempat diwacanakan menjelang Pemilu 1971. Namun, lantaran terjadi pro dan kontra, termasuk penolakan dari Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik, maka rencana penyederhanaan partai-partai politik belum bisa diterapkan di pemilu pertama rezim Orde Baru tersebut. Penyederhanaan partai-partai politik peserta pemilu tentu saja bukan tanpa alasan.

Rully Chairul Azwa (2009) memaparkan, setelah dilakukan kebijakan fusi partai-partai politik pada 1973 itu, posisi Golkar semakin kuat di antara dua kekuatan politik lainnya, yakni PPP dan PDI. Selain itu, partai-partai hasil fusi ternyata tidak lantas bisa bebas bergerak begitu saja. Soeharto melalui jejaring kekuasaannya berhasil menyetir PPP dan PDI lewat Direktorat Sospol di TNI AD dan Kementerian Dalam Negeri. Identitas asli partai-partai yang berfusi pun perlahan digerus sehingga hanya menyisakan dua ideologi besar, yakni partai Islam dan partai nasionalis. PPP, PDI, dan Golkar pun bertarung di Pemilu 1977 untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD. Sementara presiden menjadi ranah MPR dan Soeharto lewat segala cara selalu bisa memastikan bahwa ia yang akan tetap menduduki kursi kekuasaan.

Manipulasi yang dilakukan rezim Orde Baru semakin kuat pada Pemilu 1977 ini. Pemilihan menggunakan sistem proporsional daftar tertutup. Pemilih tidak dapat melihat wajah dan mengetahui nama calon-calon anggota parlemen yang seharusnya akan dipilih, dan hanya bisa mencoblos partai politik. Hasilnya pun sudah dapat diperkirakan. Golkar menang telak dengan perolehan 62,1 persen suara dan memperoleh 232 kursi di DPR. Di posisi kedua ada PPP dengan 29,2 persen suara (99 kursi DPR), dan PDI menduduki tempat ketiga dengan 8,6 persen suara (29 kursi DPR). Golkar lagi-lagi

dominan, Soeharto pun tetap nyaman di puncak kekuasaan (Ardanareswari, 2019).

Konflik dan Perpecahan partai politik di Indonesia bukanlah sebuah persoalan yang baru, tetapi fenomena perpecahan partai sudah lama terjadi sebelumnya, di era reformasi partai politik selalu saja di terpa dengan masalah perpecahan yang tak kunjung selesai. Partai politik merupakan sebuah struktur yang terdiri atas beberapa kelompok yang saling berkompetisi dan berbeda pendapat. Setiap kelompok di dalam partai sangat mungkin membawa cara berpikir yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya ideologi, platform, dan visi partai dijalankan. Sebagai sebuah entitas kolektif, terbentuknya faksi dan berlangsungnya konflik internal partai menjadi risiko organisasi yang sulit dihindari. Faksionalisasi menjadi hal umum yang terjadi di banyak partai di berbagai negara, tidak hanya pada partai di negara-negara demokrasi.

Kecenderungan konflik internal partaipartai politik tersebut disebabkan oleh kepentingan politik elit-elit partai dalam memilih koalisi mengukung calon peresidenwakil presiden dan/atau bergabung serta tetap dengan pemerintah yang berkuasa. Partai-partai politik era reformasi kerap mengalami konflik internal yang berujung pada perpecahan dan menghasilkan kepemimpinan ganda.

Sejarah politik di Indonesia memperlihatkan bahwa faksionalisasi dan konflik internal parpol juga kerap terjadi di dalam dinamika perkembangan partai politik. Bahkan, sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, fenomena perpecahan partai politik telah berlangsung, yakni ditandai dengan terbaginya Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) menjadi dua faksi: faksi nonkomunis, dikenal dengan Sarekat Islam (SI) -Putih, dan faksi komunis, dikenal sebagai SI-Merah. Pascakemerdekaan, konflik yang berujung pada perpecahan partai kembali terjadi. Perpecahan internal Partai Masyumi menjadi salah satu kasus besar yang terungkap di awal Pemerintahan Sukarno. Namun, persoalan perpecahan internal parpol tidak hanya dimiliki oleh Masyumi, tetapi oleh hampir semua partai politik pascakemerdekaan.

Peristiwa pembelahan faksi dan konflik internal partai sempat mereda pada era Demokrasi Terpimpin Sukarno. Hal ini disebabkan pada saat itu, Pemerintah Sukarno membatasi jumlah dan pengaruh partai di dalam arena politik, sehingga, untuk tetap mempertahankan peran parpol, maka soliditas dan kohesi partai menjadi penting untuk diperkuat. Namun, persoalan perpecahan partai kembali menguat di masa Orde Baru ketika Pemerintahan Soeharto secara paksa menggabungkan beberapa partai menjadi hanya dua partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Akibatnya, konflik antarfaksi di dalam kedua partai itu tak terelakan. Sebagai contoh, pertikaian antarelite PPP menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 1992 yang berakibat pada dualisme pencalonan legislatif (caleg) dalam pemilu dan konflik internal: serta perpecahan elite PDI pada tahun 1991 yang mengakibatkan lahirnya pengurus PDI Tandingan di bawah pimpinan Achmad Soebagjo. Pada era kepemimpinan Soeharto ini, peran pemerintah sangat besar mempengaruhi terbentuknya faksi dan konflik internal partai.

Setelah runtuhnya pemerintah otoritarian, reformasi politik dilakukan secara menyeluruh di bawah sistem demokrasi baru Indonesia. Sistem kepartaian menjadi salah satu aspek yang tidak luput untuk direformasi. Indonesia membuka keran politik seluas-luasnya untuk pendirian parpol, tetapi persyaratan pendirian dan pengaturan organisasi partai diatur semakin ketat di dalam Undang-Undang (UU). Salah satu hal yang diatur di dalam pengorganisasian partai itu berkaitan dengan upaya meminimalkan perpecahan dan konflik internal partai, misalnya, tentang mekanisme penyelesaian kepengurusan ganda dan mekanisme penyelesaian perselisihan partai. Meskipun upaya memperkuat kohesi partai politik telah diupayakan, persoalan konflik internal partai belum selesai. Alih-alih selesai, persoalan ini justru semakin banyak ditemukan pada era reformasi belakangan ini.

Pembelahan partai politik menjadi beberapa faksi di dalam partai menjadi persoalan hampir di semua partai besar di era reformasi. Awal perpecahan

partai di era reformasi terlihat pada tahun 2001 ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terbagi menjadi faksi pendukung Sidang Istimewa Majelis Perwakilan Rakyat (SI MPR), atau disebut dengan Kaukus Nasionalis dan faksi yang menolak SI MPR. Faksionalisasi PDIP ini diikuti kemudian oleh partai-partai besar lainnya, termasuk Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat (PD), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berikut di bawah ini merupakan rekapitulasi beberapa catatan kasus perpecahan faksi partai politik yang terjadi di era reformasi (Budiatri & Putri, 2018).

1. PDIP

- 1) Pada tahun 2001, terdapat faksi yang menolak dan yang mendukung percepatan SI-MPR. Faksi yang mendukung menamakan diri sebagai Kaukus Nasionalis.
- 2) Pada tahun 2002, terdapat beberapa elite yang keluar dari PDIP, termasuk Sophan Sophiaan dan Prof. Dimayati Hartono. Saat itu, pecahan PDIP bahkan mendirikan partai baru bernama Partai Indonesia Tanah Airku (PITA).
- 3) Pada tahun 2005, PDIP terpecah dengan terbentuknya gerakan pemurnian dan pembaharuan partai yang dimotori Kwik Kian Gie dan Suko Waluyo. Beberapa elite mendirikan partai baru, termasuk Eros Djarot yang mendirikan Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK).

2. Partai Golkar

- 1) Pada tahun 2002, Partai Golkar terpecah menjadi dua faksi, yakni faksi yang mendukung Akbar Tanjung tetap menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dan Ketua Umum Partai setelah divonis tiga tahun penjara, dan faksi yang menolak.
- 2) Pada tahun 2004, Partai Golkar terpecah menjadi dua kelompok menjelang Pemilihan Presiden Langsung Putaran kedua. Partai Golkar secara resmi mendukung Megawati-Hasyim Muhzadi, sementara beberapa elite menolak dan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono

(SBY)Jusuf Kala (JK). Akibatnya, faksi yang berseberangan dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar membentuk Forum Pembaharuan Partai Golkar.

- 3) Pada tahun 2012, Partai Golkar terpecah antara kelompok yang mendukung Aburizal Bakrie sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014, dan yang mendukung Jusuf Kalla.
- 4) Pada tahun 2014, Partai Golkar terpecah menjadi dua faksi yakni pertama yang dipimpin oleh Agung Laksono, dan yang kedua di pimpin oleh Aburizal Bakrie.

3. PAN

- 1) Pada tahun 2006, PAN mengalami perpecahan setelah kelompok pendukung PAN berbasis Muhammadiyah yang digawangi oleh Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) kecewa dengan partai, dan akhirnya mendirikan partai baru bernama Partai Matahari Bangsa (PMB).
- 2) Tahun 2020, pada kongres PAN V di Kendari, terdapat ketidaksepakatan akan kemenangan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum lagi. Beberapa pengikut yang tidak sepakat termasuk Amien Rais sebagai pendiri PAN pun menyatakan hengkang dari PAN dan mendirikan Partai Ummat

4. PKB

- 1) Pada tahun 2002, PKB terpecah menjadi dua faksi yakni kubu Matori Abdul Djilil dan kubu Alwi Shihab (didukung oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur).
- 2) Pada tahun 2005, PKB terbagi menjadi dua faksi antara faksi Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf dengan faksi Muhaimin Iskandar (yang didukung oleh Gus Dur).
- 3) Pada tahun 2008, terjadi konflik internal PKB antara kubu Muhaimin Iskandar dengan kubu Abdurrahman Wahid, yang kemudian dilanjutkan oleh Yenny Wahid pasca-wafatnya Gus Dur.

5. Partai Demokrat

- 1) Pada tahun 2005, PD mengalami perpecahan setelah sejumlah kader partainya merasa kecewa atas beberapa hal termasuk terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai ketua partai dan tidak masuknya sejumlah nama rekomendasi partai yang menjadi menteri di dalam Pemerintahan SBY. Sys NS, yang merupakan pengurus partai, keluar dari PD dan mendirikan partai baru.
- 2) Tahun 2021, mengalami dualism Partai democrat menjadi dua kubu antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko. Antara AHY dan Moeldoko pun saling bertarung di ranah hukum, namun akhirnya kudu AHY menang dan kepemimpinan PD masih berada di tangannya sampai sekarang.

6. PPP

- 1) Pada tahun 2002, PPP Reformasi yang dipimpin oleh Zainuddin M.Z. muncul sebagai faksi baru dari PPP yang dipimpin oleh Hamzah Haz. Zainuddin M.Z. kemudian mendirikan Partai Bintang Reformasi (PBR).
- 2) Pada tahun 2005, PPP yang dipimpin Hamzah Haz terpecah menjadi dua kubu yang mendukung Hamzah Haz dan kubu lainnya yang mendorong gerakan pembaharuan dan perubahan PPP.
- 3) Pada tahun 2014 hingga saat ini, PPP terbagi atas dua kubu, yakni kubu Djan Faridz dan kubu M. Romahurmu.
- 4) Perpecahan berlanjut. Pada 2018, Djan mundur dari jabatan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta dan digantikan Humphrey Djemat.

7. PKS

- 1) Pada tahun 2016, PKS mengalami konflik internal setelah Fahri Hamzah, yang merupakan loyalis Anis Matta (pimpinan PKS periode sebelumnya), tidak masuk ke dalam struktur pengurus harian Dewan Pengurus Pusat PKS -meski menjadi anggota Majelis Pertimbangan Partaidalam kepengurusan baru Sohibul Iman.
- 2) Pada tahun 2018, perpecahan terjadi akibat DPP mewajibkan seluruh Caleg PKS menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong.
- 3) Tahun 2019, konflik kembali mencuat, adanya pembaharuan yang di inginkan Anis Matta terhadap PKS, dan mendapat penolakan. Hal

tersebut menyebabkan keinginan Anis Matta dan kawan-kawan mendirikan partai baru yaitu Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).

8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

- 1) Pada 2014, Partai Hanura mengalami perpecahan karena perbedaan pemberian dukungan dalam pencalonan Pemilu Presiden (Pilpres), dan diakhiri dengan keluarnya Hary Tanoe dari partai.
- 2) Pada tahun 2018, ditengarai terpecah akibat perbedaan pemberian dukungan dalam pilkada dan pemecatan Ketua DPD akibatnya 27 DPD dan 418 DPC menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Oesman Sapta Odang
- 3) Perseteruan kemudian berlanjut dan terjadi antara Oso dan Wiranto. Kubu Wiranto menolak mengakui OSO sebagai Ketua Umum Hanura yang terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Hanura III, 18 Desember 2019. Namun akhirnya Wiranto pun memutuskan mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) karena ingin fokus pada tugas baru sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

9. Partai Nasional Demokrat

Pada 2013, Partai Nasdem terpecah ditandai dengan keluarnya Hary Tanoe dari kepengurusan partai (Nasdem)

10. Partai Berkarya

Konflik ini melahirkan kubu Tommy dan Muchdi Pr. Kubu Muchdi Pr menggelar musyawarah nasional luar biasa pada 11-12 Juli 2020 di Jakarta. Dalam forum itu ia didapuk sebagai ketua umum. Tak berselang lama, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 yang mengesahkan kepengurusan Muchdi Pr. Tommy pun menggugat keputusan Yasonna. Hasilnya, pada 17 Februari 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Tommy atas kepengurusan Partai Berkarya.

Hampir semua partai yang memiliki kursi di parlemen saat ini pernah memiliki sejarah konflik internal dan pembelahan faksi. Dibandingkan dengan partai lain, Partai Golkar menjadi partai yang paling sering dilanda

kekisruhan internal. PPP, PDIP, dan PKB menjadi partai lain yang juga memiliki persoalan perpecahan hingga beberapa kali pada era reformasi ini. Tidak hanya partai yang lahir pada era awal reformasi, seperti PKB dan PAN, partai baru yang muncul di tengah era ini seperti Partai Nasdem dan Partai Hanura tidak luput dari ancaman faksionalisasi.

Terpecahnya elite menjadi beberapa faksi di dalam partai politik memiliki potensi yang kuat untuk melahirkan partai politik baru. Sebagai contoh, selama era reformasi berlangsung, Partai Golkar telah menjadi sumber kelahiran dari enam partai baru, termasuk Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Tidak hanya Partai Golkar yang terpecah belah menjadi beberapa partai baru, tetapi juga beberapa partai lainnya seperti Partai Gelora dari konflik PKS dan Partai Ummat akibat konflik dari PAN.

VI. PENUTUP

6.1. Simpulan

Setelah menganalisis data dan menemukan substansi mengenai pembentukan dan strategi Partai Gelora dan Partai Ummat Menuju Pemilihan Umum tahun 2024. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partai Gelora dan Partai Ummat dibentuk atas dasar perpecahan internal PKS dan PAN. Konflik di PKS, tidak terpenuhi tuntutan Anis Mata melakukan pembaharuan pada PKS, hal ini termasuk pendekatan sosiologis. Konflik Partai Ummat sebagai akibat konflik individu Amien Rais dengan Zulkifli Hasan serta perbedaan tujuan elit PAN, hal tersebut termasuk pendekatan pilihan rasional.
2. Strategi Partai Gelora dan Partai Ummat menuju Pemilu 2024 dengan melakukan promosi partai, mempertahankan basis pemilih, lolos ambang batas parlemen 4%, memanfaatkan sumber daya partai dan peluang politik dengan caranya masing-masing.
3. Sebagai partai pendatang baru, Partai Gelora dan Partai Ummat, peneliti berasumsi bahwa kedua partai ini akan lolos ambang batas parlemen 4% dan bertahan pada Pemilu 2024 jika partai mampu mengoptimalkan peluang politik dan membuat strategi yang tepat.

6.2. Saran

1. Bagi partai politik, sebaiknya partai politik perlu melakukan pembenahan tata kelola kepartaian maupun pelembagaannya. Kegagalan mengelola konflik partai politik berpotensi merusak soliditas sekaligus menurunkan citra partai, dan menggerus loyalitas pemilih. Jika setiap partai politik di Indonesia mampu menjalankan pelembagaan partai politiknya dengan baik, maka tentunya konflik internal kemungkinannya akan kecil terjadi. Selain itu, jika konflik parpol dapat diselesaikan secara bijaksana dengan penuh

kedewasaan supaya praktik demokrasi politik Indonesia dapat berjalan secara baik.

2. Bagi Partai Gelora dan PAN, perlu optimalisasi dalam strategi partai, melihat bahwa kedua partai memiliki sumber daya dan peluang yang baik. Jika peluang tersebut dioptimalkan, kemungkinan besar kedua partai akan lolos ambang batas parlemen 4%.
3. Dalam lingkup penelitian yang terbatas, peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu menganalisis lebih dalam mengenai partai politik baru, mengingat penelitian ini menganalisis bagaimana pembentukan partai baru, strategi partai politik. Peneliti selanjutnya dapat memperdalam analisis ini dari masing-masing indikator dan masing-masing partai yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, A. 2002. *Understanding C.R. SIPABIO A Conflict Analysis Model*. Mary Kishimba. HYPPERLINK.
- Adryamarthanino, V. 2021. *Fusi Partai Politik 1973*. Kompas.com. Tersedia di <https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/12/090000079/fusi-partai-politik-1973?page=all>.
- Akmar, Z. 2019. Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2016: Studi Kasus Konflik Fahri Hamzah Dengan Pimpinan DPP PKS. *POLITIKA, Jurnal Ilmu Politik*, 10(1): 89.
- Ali, N. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Amirullah 2022. *Kampanye Zulkifli Hasan untuk Anaknya saat Bagi Minyak Goreng Dianggap Tak Etis*. tempo.com. Tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/1611875/kampanye-zulkifli-hasan-untuk-anaknya-saat-bagi-minyak-goreng-dianggap-tak-etis>.
- Anonim, n.d. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*.
- Antara 2020. *Kalahkan Anak Amien Rais, Zulhas Jadi Ketua Umum PAN lagi*. mediaindonesia.com. Tersedia di <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/289358/kalahkan-anak-amien-rais-zulhas-jadi-ketua-umum-pan-lagi.html>.
- Ardanawati, I. 2019. *Sejarah Pemilu 1977: Taktik Fusi Parpol ala Soeharto & Orde Baru*. tirto.id. Tersedia di <https://tirto.id/sejarah-pemilu-1977-taktik-fusi-parpol-ala-soeharto-orde-baru-dl3V>.
- Argenti, G. 2021. *Partai Baru Antara Gelora, Ummat, Dan Masyumi (Reborn)* Oleh : Gili Argenti. (September).
- Arzi, A.W.P.P. 2022. *Strategi Dpw Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pendidikan Politik Pada Kaum Milenial Di Provinsi Lampung*. Diploma Thesis, Uin Raden Intan Lampung.
- Asmadianto & Nurmandi, A. 2015. Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat (Studi Kasus: Konflik Internal dan Keterpilihan Kader dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Barat 2014). *Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 2(2): 417–461.
- Azizah, N. 2015. Peran Dan Fungsi Partai Politik Islam Sebagai Rumah Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus di DPW PPP Jatim). *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 22(2): 161.

- Baldini, G. & Pappalardo, A. 2009. *Elections, Electoral Systems and Volatile Voters*. New York: Palgrave Macmillan.
- Barnea, S. & Rahat, G. 2010. Out with the old, in with the “new””: What constitutes a new party? *SAGE Journals*, 17(3).
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A. & Hertanto, H. 2022. Disrupsi Politik. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1): 1–13.
- Bayhaqi, A. 2022. *Survei PRC Elektabilitas Partai: PDIP Unggul, Disusul Gerindra dan Golkar*. Merdeka.com.
- Bhayangkara, R.I. 2019. Komunikasi Pemasaran Politik Partai Politik Baru di Indonesia (Studi Komunikasi Pemasaran Politik Partai Dengan Identitas Kepemudaan Pada Partai Solidaritas Indonesia). *Doctoral dissertation, Universitas Airlangga*.
- Bolin, N. 2007a. New Party Entrance- Analyzing the Impact of Political Institutions. *Umeå Working Papers in Political Science*, (2).
- Bolin, N. 2007b. *New Party Entrance - Analyzing the Impact of Political Institutions*. Umea: Department of Political Science, Umea University.
- Bolleyer, N. 2013. *New Parties in Old Party Systems Persistence and Decline in Seventeen Democracies*. Oxford: Oxford University Press.
- Budiardjo, M. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiatri & Putri, A. 2018. *Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bungin, B. 2015. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Caramani, D. 2017. *Party Systems. Dalam Daniele Caramani (ed). Comparative Politics (4th Edition)*. Oxford: Oxford University Press.
- Ceron, A. 2011. *Intra-Party Politics and Party System Factional Conflict, Cooperation and Fission within Italian Parties*. Università Degli Studi Di Milano, Milano.
- CNN Indonesia 2019. *Anis Matta Akui Gelora Lahir karena Konflik Internal PKS*.
- CNN Indonesia 2020. *Penggawa Partai Gelora: “Gerbong” PKS hingga Deddy Mizwar*.
- Cole, A. 2013. *Perbandingan Partai Politik: Sistem dan Organisasi, di Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid 1), ed. John T. Ishiyama dan Marijke Breuning*. Jakarta: Kencana.
- Cox, G.W. & McCubbins, M.D. 2007. *Legislative Leviathan: Party Government in the House*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Databoks.katadata.co.id 2022. *Ini Perolehan Suara PKS dalam Pemilu 1999-2019*.
- Demirkol, Ö. 2014. *Why Do Political Parties Split? Understanding Party Splits*

And Formation Of Splinter Parties In Turkey. A PhD Dissertation Department of Political Science Ihsan Doğramacı Bilkent University Ankara, Tersedia di <https://ejournal.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>.

Detikcom 2021. *Popularitas Parpol Baru dalam Survei Litbang Kompas: 83% Responden Tidak Tahu*. Detikcom. Tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-5777543/popularitas-parpol-baru-dalam-survei-litbang-kompas-83-responden-tidak-tahu>.

Detiknews 2020. *PAN Tegaskan Beda dengan Partai Ummat: Kami Nasionalis Religius*.

Dowding, K., John, P. & Mergoupis, T. 2000. Exit, Voice and Loyalty : Analytic and Empirical Developments. *European Journal of Political Research*, 37: 469–95.

Duverger, M. 1970. *Siyasal Partiler: Modern Devletteki Örgütleri Ve Faaliyetleri*. Ankara: Sevinç Matbaası.

Efriza 2019. Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik (The Existence of The Political Parties in Public Perception). *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(1): 17-38.

Eramadani 2020. *Profil 4 Calon Ketua Umum PAN Dalam Kongres V di Kendari*. eramadani.com. Tersedia di <https://eramadani.com/profil-4-calon-ketua-umum-pan-dalam-kongres-v-di-kendari/> [Accessed 8 November 2022].

Erlingsson, G.Ó. 2002. *Explaining Party Formation in Swedish Local Politics 1973 – 2002*. Gnesta: The Ratio Institute, Gnesta.

Evans, K. 2016. *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzia, M. 2022. *5 Kritik Amien Rais untuk Jokowi: Sebut Rezim Ugal-ugalan, Minta Tak Tambah Utang, hingga Hentikan Proyek IKN*. Kompas.com. Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/06365621/5-kritik-amien-rais-untuk-jokowi-sebut-rezim-ugal-ugalan-minta-tak-tambah.%0A>.

Firmanzah 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Friedrich, C.J. 1950. *Constitutional Government and Democracy*. New York: Blaisdell.

Geotimes Indonesia 2022. *Saiful Mujani: Tak Ada Kebaruan, Partai Baru Sulit Lolos*. Geotimes. Tersedia di <https://geotimes.id/berita/saiful-mujani-tak-ada-kebaruan-partai-baru-sulit-lolos/> [Accessed 22 November 2022].

Giddens, A. 2010. *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat . Terjemahan oleh Maufur dan Daryanto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Guritno, T. 2021. *Permata Ummat, Sayap Partai Ummat untuk Perempuan yang Dipimpin Eks Ketua DPP PAN*. Kompas.com. Tersedia di

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/09/16160501/permata-ummat-sayap-partai-ummat-untuk-perempuan-yang-dipimpin-eks-ketua-dpp>. [Accessed 23 November 2022].

- Haboddin, M. 2017. Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak. *Jurnal Transformative*, 3(2): 1–15.
- Hanafi, R.I. 2018. Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 15.
- Hardani, D. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Harmel, R. & Robertson, J.D. 1985. Formation and Success of New Parties: A Cross-National Analysis. *International Political Science Review*, 6(4).
- Hine, D. 2013. Factionalism in West European Parties: A Framework for Analysis. *West European Politics*, 5(1): 41.
- Huda, A.A.S.A. 2022. *Konflik Antar Kelompok Dalam Kongres V Partai Amanat Nasional (Studi Terhadap Kelompok Pendukung Zulkifli Hasan dan Pendukung Mulfachri Harahap)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hug, S. 2001. *Altering Party Systems: Strategic Behavior and the Emergence of New Political Parties in Western Democracies*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Ignazi, P. 1996. The Crisis of Parties and the Rise of New Political Parties. *Party Politics*, 2(4): 549–566.
- Ihsan, A.B. 2017. Corak Ideologis Partai Politik Islam. *Jurnal Review Politik*, 7(1): 1–25. Tersedia di <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/104>.
- Iswandi 2020. Studi Gerakan Ideologi Partai Politik Pada Pemilu 2019. *Politica*, Vol. 7, 7(1): 3–21. Tersedia di <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Juliantara, T. 2021. Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi Masyumi Menanggapi Perjanjian Roem-Royen Tahun 1949. *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2(2): 373–392.
- Katz, R.S. & Crotty, W. 2014. *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusamedia.
- Kitschelt, H.P. 1988. Left-Libertarian Parties: Explaining Innovation in Competitive Party Systems. *World Politics*, 40(2): 194–234.
- Kpu.go.id 2023. *Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan*. Kpu.go.id. Tersedia di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Detail_parpol/detail_parpol/77.
- KPU RI 2022. *Pemilu 2014*. kpu.go.id. Tersedia di

<https://www.kpu.go.id/page/read/1116/pemilu-2014> [Accessed 21 November 2022].

- L, D.S. 2015. Manajemen konflik partai politik. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi*, VII(07): 17–20.
- Labolo, M. & Ilham, T. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lagabuana, B.F., Sukri & Haryanto 2021. Bertahan dan Menang: Strategi dan Modal Politik Sri Rahmi dalam Pemilihan Legislatif 2004-2019 di Sulawesi Selatan. *Jurnal Transformative*, 7(2): 157–173.
- Lago, I. & Martínez, F. 2011. Why New Parties? *Party Politics*, 17(1): 3.
- Liliweri, A. 1997. *Komunikasi Antar Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lipset, S.M. & Rokkan, S. 1967. Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction. In *Party Systems and Voter Alignments: Cross National Perspectives*, eds. New York: Free Press.
- Litbang Kompas 2022. *Pemilih Kabur 50% Versi Litbang Kompas, PAN Yakin Bukan Negara Partai Ummat*. Detikcom. Tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-5954623/pemilih-kabur-50-versi-litbang-kompas-pan-yakin-bukan-gegara-partai-ummat> [Accessed 24 Januari 2023].
- Lucardie, P. 2000. Purifiers and Prolocutors: Towards a Theory on the Emergence of New Parties. *Party Politics*, Vol. 6. No.
- Mahdi, M.I. 2022. *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022*. DataIndonesia.id. Tersedia di <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>. [Accessed 18 Februari 2023].
- Manzilati 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- Maor, M. 1998. *Parties, Conflicts and Coalitions in Western Europe: Organizational Determinants of Coalition Bargaining*. London and New York: Routledge.
- Mardaya, Ubaidullah & Ardiansyah 2019. Pelembagaan Partai Politik (Studi Kasus Dewan Pimpinan Provinsi (Dpp) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 4(4): 1–15.
- Marijan, K. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Matlap, R. 2015. *Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Partai Politik yang Transparan dan Akuntabel*. Kompasiana.com. Tersedia di <https://www.kompasiana.com/roziqinmatlap/551c187c81331151019de2dd/pemeriksaan-bantuan-keuangan-partai-politik-dalam-rangka-mewujudkan-pengelolaan-keuangan-partai-politik-yang-transparan-dan->

akuntabel%0A%0A%0A.

- McAllister, I. 1991. Party Adaptation and Factionalism in within the Australian Party System. *American Journal of Political Science*, 35(1): 208.
- McAllister, I. & White, S. 2007. Political Parties and Democratic Consolidation in Post-Communist Societies. *Party Politics*, 13(2): 197–216.
- McGuire, R. 2004. Negotiation: an important life skill. *Pharmaceutical Journal*, 273(7306): 23–25.
- MediaIndonesia.com 2023. *Survei Polmatrix: Elektabilitas PAN-PKS Merosot, PSI Kembali Naik*. Tersedia di <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/553341/survei-polmatrix-elektabilitas-pan-pks-merosot-psi-kembali-naik> [Accessed 23 Februari 2023].
- Merdeka.com 2020. *Kongres PAN 2020, Petahana Versus Restu Amien Rais*. Merdeka.com. Tersedia di <https://www.merdeka.com/khas/kongres-pan-2020-petahana-versus-restu-amien-rais.html> [Accessed 18 November 2022].
- Migdal, J.S. 1988. *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in The Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Moertopo, A. 1974. *Strategi Politik Nasional. Centre for Strategic and International Studies. Modern State*. London: Methuen.
- Moleong & J, L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong & Lexy 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, M. 2006. *Persaingan partai politik lama dan baru dalam kemenangan pemilihan umum: Studi terhadap strategi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera dalam kemenangan pemilihan umum legislatif 2004 di Kota Banda Aceh*.
- Mufti, M. 2012. *Teori-Teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhadam Labolo, T.I. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nadliroh, T.A. 2022. Relasi Agama dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais. *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 6(1): 88–97.
- Navasari, S. & Nuralim, I. 2022. Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Di Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan. *Jurnal MODERAT*, 8(3): 633–648.
- NB, M. 2021. Strategi Manajemen Konflik Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Politik: Suatu Tinjauan Teoritis. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 3(2): 194.
- Neumann, S. 1963. *Modern Political Parties, Comparative Politics*. London: The Free Press Of Glencoe.

- Nurhasim, M. 2013. Kegagalan Modernisasi Partai Politik Di Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10.
- Nuvunga, A. & Adalima, J. 2011. *Mozambique Democratic Movement (MDM): An Analysis of a New Opposition Party in Mozambique*. Maputo: Friedrich-Ebert-Stiftung Mozambique.
- Özbudun, E. 1981. The Turkish Party System: Institutionalization, Polarization, and Fragmentation. *Middle Eastern Studies*, 17(2): 228–40.
- Pabottingi, M. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Patawari, P., Muin, I. & Amir, M. 2019. Studi Perbandingan: Rekrutmen Calon Anggota Legislative Kaitannya dengan Fungsi Partai Politik. *Petitum*, 7: 100–116.
- politik rmol.id 2022. *Survei Gelora dan Partai Ummat Parpol Paling Populer Jelang 2024*.
- Prasetyo, I.D. 2020. *Masih Relevankah Organisasi Kampus bagi Mahasiswa?*. qureta.com. Tersedia di <https://www.quareta.com/next/post/masih-relevankah-organisasi-kampus-bagi-mahasiswa>.
- Pruitt, D.G. & Rubin, J.Z. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purbolaksono, A. 2020. *Polemik Usulan Ambang Batas Parlemen Pemilu 2024*. The Indonesian Institute.com. Tersedia di <https://www.theindonesianinstitute.com/polemik-usulan-ambang-batas-parlemen-pemilu-2024/> [Accessed 30 November 2022].
- Raditya, I.N. 2020. *Bunyi Isi Pancasila, Makna, Lambang, & Butir Pengamalan Sila 1-5*. tirta.id. Tersedia di <https://tirta.id/f7zd>.
- Rauf, M. 2001. *Konsensus Politik dan Konflik Politik*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.
- Richard, T. 2005. *Smart Sales People Don't Advertise*. USA: Richard Stowell Enterprise, LLC.
- Rizky, D. 2022. *Parlemen 2024 Diprediksi Hanya Diisi 6 Parpol*. inilah.com. Tersedia di <https://www.inilah.com/parlemen-2024-diprediksi-hanya-diisi-6-parpol>.
- Romli, L. 2018. Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 8(2): 95–118.
- Ross, J.E. 1993. *Total Quality Management: Text, Cases and Readings*. London: Kogan Page Limited.
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasaran Indonesia.
- Saputra, T.R. 2014. Sistem Kaderisasi Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif

- Dalam Pemilu 2009. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2014, 2 (1): 1829-1841, 2(1): 1829–1841.
- Saragih, S. 2018. *Kemendagri: Caleg Instan Urusan Internal Parpol*. kabar24.bisnis.com. Tersedia di <https://kabar24.bisnis.com/read/20181018/15/850842/kemendagri-caleg-instan-urusan-internal-parpol.%0A> [Accessed 27 November 2022].
- Sartori 1967. *Parties. and Party System. A Framework for analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sayari, S. 2002. *Introduction.*” In *Political Leaders and Democracy in Turkey*, eds. *Metin Heper and Sabri Sayari*. Lanham, Maryland: Lexington Books.
- Schattschneider, E.E. 1975. *The Semisovereign People: A realist’s view of democracy in America*. Illionis: The Dryden Press Hinsdale.
- Schroder, P. 2009. *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
- Seno 2022. *Seberapa Besar Partai Ummat Mengancam Elektabilitas PAN?* Optika.id. Tersedia di <https://www.optika.id/in-depth/seberapa-besar-partai-ummat-mengancam-elektabilitas-pan>.
- Siavelis, P.M. 2006. *Party and Social Structure*”, dalam *Richard S Katz. dan William Crotty (Eds.), Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications.
- Sikk, A. 2011. Newness as a Winning Formula for New Political Parties. *Party Politics*, 18(2): 465–486.
- Sjamsuddin, N., Hamid, Z. & Pribadi, T. 1988. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Karunika (Universitas Terbuka).
- Soemardjan, S. 2000. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sorta, B. 2021. *Profil Amien Rais Bapak Reformasi dan Pembaharuan*. schmu news. Tersedia di <https://news.schmu.id/amien-rajs-bapak-reformasi/>.
- Strom, K. & Müller, W.C. 2009. *Parliamentary Democracy, Agency Problems and Party Politics. In Intra-party Politics and Coalition Governments*. Oxon, New York: Routledge.
- Subhanie, D. 2021. *Songsong Pemilu 2024, Partai Ummat Punya Sayap Baru Bernama Garda Ummat*. SINDOnews.com. Tersedia di <https://nasional.sindonews.com/read/625697/12/songsong-pemilu-2024-partai-ummat-punya-sayap-baru-bernama-garda-ummat-1639239179> [Accessed 23 November 2022].
- Sufa, I.G. 2022. *Terseret Kasus Suap, Zulkifli Hasan Tegaskan Tak Kenal Rektor Unila*. Katadata.co.id.
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: CV Solusi Distribusi.

- Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono 2019a. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono 2019b. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumarno, Haryanto & Sapton, B. 2013. Orientasi Modal Sosial Dan Modal Kultural Di Fakultas Ilmu Pendidikan U.N.Y. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2): 68–77.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo Utama.
- Susan, N. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Susanti, M.H., Setiajid & Anandha 2021. The Dynamics of Local Democracy on Simultaneous Election in Semarang District. *Proceedings of the 6th International Conference on Education & Social Sciences (ICESS 2021)*. Atlantis Press, hal.208–212.
- Syahda, P.H. & Rafni, A. 2021. Strategi Calon Legislatif Partai Gerindra dalam Memenangkan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1): 66–72.
- Vassallo, F. & Wilcox, C. 2006. "Party as a Carrier of Ideas" dalam Richard S Katz. dan William Crotty (Eds.), *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications.
- Wahyudi 2011. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Cetakan Ke ed. Bandung: Alfabeta.
- White, J.K. 2006. *What is Political Party dalam Richard S Katz. and William Crotty (Eds.), Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications.
- Whittaker, D.J. 1999. *Conflict and Reconciliation in the Contemporary World*. Routledge.
- Widyana, M.R. 2022. Strategi Partai Gelora Sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 Untuk Memenuhi Parliamentary Threshold. *Jurnal PolGov*, 4(1): 125–168.
- Winardi 1994. *Manajemen Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Wirawan 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wiyoko, H. 2021. *Ayo Kenali Dasar Hukum Pemilu dan Pilkada 2024*. Kompasiana.com. Tersedia di <https://www.kompasiana.com/hananwiyoko1707/605058f4d541df5aac50151>

2/ayo-kenali-dasar-hukum-pemilu-dan-pilkada-2024 [Accessed 28 November 2022].

Yenrizal 2003. Budaya Politik Kulit dan Komunikasi Politik Demokratis di Indonesia. *Mediator*, 4(1): 151–156.

Zariski, R. 1960. Party Factions and Comparative Politics: Some Preliminary Observations Midwest. *Journal of Political Science*, 4(1): 33.

Zein, W. 2020. Nama “Partai Ummat” Lebih Prospektif daripada “PAN Reformasi”? Kompasiana.com. Tersedia di <https://www.kompasiana.com/wiwin10587/5f75f61ad541df43416ab694/nama-partai-ummat-lebih-prospektif-daripada-nama-pan-reformasi> [Accessed 22 November 2022].

Zúborová, V. 2015. Newcomers in Politics? the Success of New Political Parties in the Slovak and Czech Republic after 2010? *Baltic Journal of Law and Politics*, 8(4): 91–111.